



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK BERJANGKA



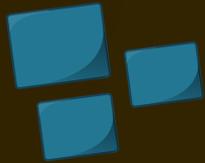
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

**Gudang Pangan
SRG Bantul Beroperasi ■
Transaksi PLKA
Capai Rp 237 miliar ■**

10 TAHUN MENEBAR INFORMASI



SUDAH MENDESAK
EMERENTAH & DPR BAHAS RUU PBK
JFX RAMU KONTRAK SYARIAH
MERUJUK CPO BKDI
MELONGOK PBK INDIA
KADO AKHIE TAHUN 2010



DARI REDAKSI

Sidang pembaca Buletin Kontrak Berjangka yang tercinta, edisi Maret 2011 ini merupakan edisi istimewa dari edisi-edisi yang sebelumnya. Karena, tepat pada edisi Maret 2011 ini, Buletin Kontrak Berjangka genap berusia 10 tahun hadir di tangan para pembaca.

Usia 10 tahun tentunya merupakan perjalanan yang lumayan panjang bagi sebuah media. Dan, selama masa perjalanan itu, ada pasang surut kehadiran buletin ini. Tetapi dengan satu motivasi, Bappebti sebagai penerbit, memiliki tanggungjawab untuk selalu menghadirkan buletin ini di tangan para pembaca budiman. Sebab, disadari upaya Bappebti untuk bertemu para pelaku perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang tentu tidak cukup waktu. Melainkan dengan buletin ini, Bappebti bisa lebih dekat dengan pembaca sekaligus para pelaku dari ketiga instrumen perdagangan tersebut.

Buletin ini juga sekaligus sebagai wadah komunikasi dari antara ketiga instrumen itu. Karena pada dasarnya, ketiga instrumen perdagangan itu tidak terpisahkan satu sama lain. Hal itu tidak saja disebabkan Bappebti sebagai lembaga pembina dan pengawas, melainkan juga sejatinya tiga instrumen itu merupakan sumber informasi harga yang bisa digunakan oleh masing-masing pasar.

Memang masing-masing instrumen itu saat ini belum bekerja secara maksimal, disebabkan beberapa kendala. Tetapi di masa mendatang, dan tanda-tanda itu sudah mulai mun-

cul, keterkaitan antara tiga instrumen tersebut merupakan lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Jadi, inilah salah satu tugas dan tanggungjawab Buletin Kontrak Berjangka yang senantiasa menjadi media penghubung dari ketiga instrumen perdagangan itu. Karenanya, buletin ini pun senantiasa mengharapkan dukungan dari para pembaca dalam interaksi yang membangun tiga instrumen perdagangan itu.

Pada edisi Maret 2011, ini, Redaksi pun menyajikan berbagai informasi yang cukup beragam mulai dari kunjungan Tim Panja Komisi VI DPR RI ke Solo dan Yogyakarta dalam rangka pembahasan RUU perdagangan berjangka komoditi. Demikian juga kunjungan Tim Panja Komisi VI DPR RI ke Yogyakarta dalam rangka pembahasan RUU sistem resi gudang. Serta, informasi beroperasinya gudang pangan SRC di Bantul, Yogyakarta. Dan, tak ketinggalan kegiatan pasar lelang di daerah pun.

Akhir kata, Redaksi Buletin Kontrak Berjangka juga mengucapkan selamat kepada para pembaca yang setia mengikuti perjalanan buletin ini selama

10 tahun. Semoga buletin yang kita cintai ini semakin berkembang dan sidang pembacanya semakin meluas seiring dengan perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi. Selamat! ▲



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempumajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli Wakil **Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswanto, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

9

Resi Gudang

Gudang Pangan
SRG Bantul Beroperasi

20-21

Komoditi

Java Cananga Oil



28

KIPRAH

Ammer F Rivai
Tokoh Dibelakang Layar



Laporan Utama.....4-8

- 10 Tahun Menebar Informasi
- Tim Panja RUU PBK
Kunjungi Perusahaan Pialang Berjangka
- SRG Buffer Stock Pangan Nasional

Interview.....10-11

- Syahrul R Sempurnajaya:
Mengurai Kinerja Bappebti

Pasar Lelang12-13

- Pasar Lelang dan SRG Solusi Sektor Pertanian NTB
- Pelatihan dan Pembekalan Juru Lelang
- Transaksi PLKA Capai Rp 237 miliar

Agenda14-15

Aktualita16-17

- PT Quantum Futures Kembali Beroperasi
- Fasting News Layanan Informasi Pasar
- JFX dan BKDI 'Bertarung' Kontrak Emas
- CIMB Futures Segera Jadi Anggota BKDI

Analisa.....18

- Produksi CPO Membaik Harga Cenderung Turun
- Harga Emas Tembus Rekor Tertinggi

Info Harga19

Break News22-23

- East Java revitalized the Auction Market
- Friday is Indonesian Home Made Shoes Day
- Indonesia expands CPO market to East Europe

Wawasan24-25

- Kajian Pengembangan Kontrak Berjangka CPO

Kolom26-27

- Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi

10 Tahun Menebar Informasi

Ide menerbitkan Buletin Kontrak Berjangka pada awal tahun 2001, semula dari perbincangan ringan. Bahwa, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) perlu satu sarana yang dapat memberi informasi tentang perdagangan berjangka komoditi kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi. Tidak sekedar informasi, tetapi juga media edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi. Karena disadari instrumen perdagangan berjangka komoditi masih barang baru bagi sebagian besar masyarakat bisnis.

Di sisi lain, kebutuhan akan media itu semakin mendesak karena bursa berjangka pun baru beroperasi di Indonesia, ditandai dengan perdagangan perdana Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), tepatnya pada 15 Desember 2000. Tidak dipungkiri, saat itu pun masyarakat industri ini masih tergolong kecil. Dan, hanya segelintir masyarakat yang bisa memahami praktik perdagangan berjangka komoditi.

Di samping itu, tantangan terberat industri ini kala itu adalah, rendahnya citra perdagangan berjangka di mata masyarakat. Akibat pemberitaan yang oleh sebagian masyarakat menganggap instrumen ini sebagai lahan judi atau praktik tipu-tipu yang dilegalkan pemerintah. Di tambah lagi, pandangan masyarakat yang tertimpa praktik tipu-tipu dari perdagangan berjangka ilegal. Tetapi hal itu terjadi dikarenakan belum adanya undang-undang dan peraturan yang memayungi industri ini. Atau, adanya pelanggaran dari ketentuan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya.

Sehingga, salah satu misi utama dari terbitnya Buletin Kontrak Berjangka

yakni meningkatkan citra perdagangan berjangka komoditi. Dan, terbentuknya masyarakat industri yang sehat dalam memanfaatkan instrumen perdagangan berjangka komoditi sebagai referensi harga dan lindung nilai.

Apakah misi itu sudah tercapai? Tentunya belum. Karena kenyataannya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal industri ini. Bahkan, bursa berjangka sebagai instrumen referensi harga dan sarana lindung nilai, belum maksimal dimanfaatkan masyarakat dan para pelaku komoditi. Pada hal, Indonesia merupakan negara produsen dari sekian banyak komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka luar negeri.

Dalam perjalanannya, tahun 2003, beban Buletin Kontrak Berjangka semakin luas seiring dengan tugas dan fungsi Bappebti yang mengembangkan pasar lelang komoditi di berbagai daerah. Karenanya, di tahun 2004, buletin ini sempat memiliki suplemen. Yakni, suplemen yang diberi nama Pasar Lelang.

Semula, suplemen buletin Pasar Lelang diterbitkan secara terpisah. Dengan maksud suplemen tersebut didistribusikan secara khusus kepada para pelaku pasar lelang. Tetapi kemudian di tahun 2006, suplemen tersebut dilebur menjadi rubrikasi pasar lelang. Dengan satu alasan pasar lelang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan berjangka komoditi.

Demikian pula di tahun 2007. Rubrikasi buletin ini semakin melebar dengan disahkannya UU No.9/2006, tentang sistem resi gudang. Sehingga sampai saat ini, Buletin Kontrak Berjangka pun secara reguler menginformasikan pembiayaan sistem resi gudang.

Tiga instrumen yang diawasi dan dibina Bappebti, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar

lelang komoditi, memang memiliki segmen pembacanya yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya tiga instrumen itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Kondisi riil saat ini dari tiga instrumen perdagangan tersebut, masih berjalan secara paralel. Belum terjadi saling keterkaitan dari masing-masing instrumen. Pelaku pasar lelang belum mengacukan harga komoditi dari bursa berjangka, demikian pula para pemilik resi gudang belum memanfaatkan harga yang terjadi di bursa berjangka atau pasar lelang sebagai referensi harga komoditi yang dimasukkan ke gudang SRG. Demikian juga sebaliknya, bursa berjangka belum memperdagangkan kontrak berjangka resi gudang.

Oleh karena itu, mimpi redaksi saat ini adalah keterkaitan dari masing-masing instrumen tersebut. Sehingga tiga instrumen itu mampu menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional.

Kapan tiga instrumen perdagangan itu bisa saling memiliki keterkaitan? Tentunya hal itu bisa terjadi atas kerja keras dari masing-masing pihak. Termasuk juga Buletin Kontrak Berjangka yang senantiasa menebar informasi, edukasi dan sosialisasi. Dan, buletin ini akan siap berkarya menjadi sarana penghubung dari ketiga instrumen tersebut.

Oleh karena itu, redaksi senantiasa berharap mendapat masukan dan saran dari para pembaca masing-masing segmen, untuk pengembangan media ini di masa mendatang. Sebab, semakin tinggi masukan dan saran dari para pembaca, maka hal itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan media ini dimiliki dan dinanti para pembaca setianya. Dan perlu diingat, keberlanjutan buletin ini di masa mendatang ditentukan oleh sidang pembaca.

Semoga Buletin Kontrak Berjangka senantiasa dapat mengemban visi dan misi seperti yang tertera dibagian bawah logo, 'Mengabdikan Dengan Integritas'. ▲

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya



Meski saya relatif baru memimpin Bappebti, saya sudah mengikuti perjalanan Buletin Kontrak Berjangka. Menurut hemat saya, buletin ini menjadi salah satu sarana penting yang membantu Bappebti dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umum dan

khususnya para pelaku pasar terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi. Sarana yang lain juga sudah ada seperti web site, brosur dan lain-lain. Tetapi kita ketahui, masyarakat kita belum semua bisa mengakses teknologi informasi itu, sehingga media berbentuk cetakan seperti buletin ini cukup efektif bagi masyarakat terutama yang ada di daerah jauh dari pusat.

Berdasarkan pengamatan saya, kurang berminatnya masyarakat kita memasuki industri perdagangan berjangka komoditi lebih disebabkan belum sampainya informasi itu ke masyarakat bahwa di Indonesia pun ada bursa berjangka. Yang kedua, secara umum masyarakat belum mengetahui cara bertransaksi di bursa berjangka. Jadi, inilah tugas kita bersama. Melakukan edukasi dan sosialisasi.

Oleh karena itu, saran saya dan harapan ke depan, ada rubrikasi khusus di buletin ini semacam testimoni para pelaku. Mengisahkan keberhasilan para investor dalam bertransaksi di bursa berjangka. Demikian juga dengan para petani yang berhasil memperoleh pembiayaan dengan skema SRG dan petani yang menjual komoditinya di pasar lelang. Informasi seperti itu saya pikir cukup efektif mendorong masyarakat lain untuk menggunakan instrumen perdagangan tersebut.

Di samping itu, distribusi buletin ini harus merata ke seluruh daerah, terutama daerah yang telah dibangun gudang SRG. Bila perlu di setiap gudang SRG disediakan display untuk buletin, sehingga siapa saja yang berkunjung ke gudang bisa membacanya. Dengan demikian mereka pun mengikuti perkembangan SRG dari daerah lain.

Terakhir, saya ucapkan selamat kepada semua pihak yang telah bekerjasama membantu, bahu-membahu hingga Buletin Kontrak Berjangka berusia 10 tahun. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, karena di masa mendatang masih lebih panjang dan banyak lagi yang bisa dilakukan. ▲

Direktur Utama Jakarta Futures Exchange, Made Soekarwo



Buletin Kontrak Berjangka kian hari kian baik. Informasi yang disajikan pun semakin bervariasi. Dari sisi tampilan sudah cukup bagus dan menarik minat untuk di baca. Saya harap itu bisa dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan.

Untuk perbaikan di masa mendatang, frekuensi terbit sebaiknya tepat waktu. Sehingga para pembaca bisa mengikuti dan menunggu informasi apa yang akan disajikan.

Saya pun mengusulkan penyebaran atau distribusi buletin semakin merata dan diperluas. Agar ma-

sarakat semakin mengenal industri perdagangan berjangka dan sistem resi gudang. Dan tentunya, harapan kita masyarakat tidak hanya mengenal tetapi juga turut berperan dalam industri tersebut. Karena ruang keterlibatan masyarakat pada industri tersebut masih sangat lebar.

Usul saya, dalam pengembangan rubrikasi, sebaiknya di Buletin Kontrak Berjangka disediakan ruang tanya-jawab. Sehingga para pembaca bisa lebih memahami aspek-aspek teknis. Atau pun, masyarakat pembaca diberi kesempatan berinteraksi di buletin ini.

Akhir kata, saya atas nama manajemen JFX mengucapkan selamat penerbitan ke 10 tahun Buletin Kontrak Berjangka, kepada pengelola dan redaksi. ▲

Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Megain Widjaja



Selamat kepada Buletin Kontrak Berjangka yang sudah mencapai usia 10 tahun. Semoga dengan keberadaan buletin ini semakin mempersatukan para pelaku industri perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi melalui interaksi media massa.

Kami masih tergolong baru dalam in-

dustri perdagangan berjangka komo-
diti Indonesia. Tetapi dengan adanya
Buletin Kontrak Berjangka, kami bisa
mengikuti rekam jejak industri ini sejak
adanya UU No.32/1997 dan berope-
rasinya bursa berjangka tahun 2000.
Berita-berita yang disampaikan pun
cukup informatif. Meski informasi itu
hanya dikonsumsi para pelaku industri
perdagangan berjangka komoditi dan
pelaku sistem resi gudang.

Dengan adanya buletin ini, kami pun
sangat terbantu mengikuti program dan
kegiatan para pelaku industri perdagaa-
ngan berjangka komoditi. Demikian
juga dengan informasi perkembangan
dari sistem resi gudang dan pasar le-
lang. Dua instrumen itu tidak bisa di-
isahkan dari perdagangan berjangka ko-
moditi. Oleh karena itu, kami pun harus
mengikuti perkembangannya.

Satu hal yang terkesan buat saya
de-
ngan rubrikasi Buletin Kontrak Ber-
jangka adalah Rubrik Komoditi. Informa-
si komoditi yang ditampilkan membuat
saya bangga dengan Indonesia. Karena

ternyata cukup banyak komoditi yang
memiliki potensi pasar baik di dalam
negeri maupun di mancanegara.

Saya pernah baca tentang komoditi
minyak atsiri akar wangi dari buletin ini,
awalnya bagi saya informasi itu biasa
saja. Tetapi ketika saya berkunjung ke
Eropa, dan saya mendapatkan informasi
tentang pasar akar wangi Indonesia di
sana, sungguh menakjubkan. Dan hal
itu membuat saya bangga dengan ko-
moditi Indonesia.

Informasi lainnya yang saya ikuti dari
buletin ini adalah perjalanan para tokoh
yang diangkat di Rubrik Kiprah. Dari
informasi itu kami bisa mengikuti dan
lebih dekat lagi dengan tokoh tersebut.

Untuk pengembangan ke depan,
saya harapkan Buletin Kontrak Ber-
jangka juga mencapai para pembaca
yang berada di luar industri ini. Sehin-
ga mereka pun bisa mengikuti perkem-
bangan industri perdagangan berjangka
komoditi dan sistem resi gudang. Dan
pada akhirnya mereka tertarik untuk
masuk industri ini. ▲



Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Suardiyanto Suryodarmodjo.

Selamat atas kesinambungan
penerbitan Buletin Kontrak Ber-
jangka selama satu dasa warsa.
Hingga mencapai usia satu dasa warsa,
merupakan satu prestasi yang mem-
banggakan.

Harapan kami, semoga Buletin Kon-
trak Berjangka semakin mencerahkan
pemahaman para pemangku kepenting-
an terhadap industri perdagangan ber-

jangka komoditi, sistem resi gudang dan
pasar lelang komoditi.

Dan tentunya, informasi yang disaji-
kan ditunggu-tunggu para pembaca dari
waktu ke waktu.

Ever on forward, never retreat. Jadi-
kan harapan kita semua agar Buletin
Kontrak Berjangka sebagai primary bule-
tin berjangka di negeri tercinta ini men-
jadi kenyataan.



Ketua Umum Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), F. Wishnubroto.

Buletin Kontrak Berjangka
sudah bagus dan baik. Dan,
mampu memberi pembelajaran
kepada para pembaca atau ma-
syarakat untuk mengetahui seluk-
beluk perdagangan berjangka ko-
moditi. Di samping itu, kami rasakan
buletin ini menjadi sarana pengikat
para pelaku perdagangan berjangka
komoditi.

Saran ke depan, perlu ada ru-

brikasi yang menampung wacana atau
pendapat dari para praktisi perdagangan
berjangka komoditi Indonesia. Sehingga
industri ini semakin berkembang dan pu-
nya berperan dalam perekonomian nasi-
onal. Dan, dalam jangka panjang menjadi
salah satu tolak ukur ekonomi Indonesia.

Selamat atas 10 tahun berkarya
mempersatukan industri perdagangan
berjangka komoditi melalui Buletin Kon-
trak Berjangka. ▲

Tim Panja RUU PBK Kunjungi Perusahaan Pialang Berjangka

Komisi VI DPR RI dalam memperkaya wawasan dan menampung usulan sehubungan dengan pembahasan amandemen UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka, melakukan kunjungan kerja kepelaku pasar perdagangan berjangka komoditi di Solo, Jateng dan DI Yogyakarta, 28 Februari - 1 Maret 2011. Kunjungan kerja Anggota Komisi VI di Kota Solo, dilaksanakan di kantor cabang PT Rifan Financindo Berjangka. Sedangkan di Yogyakarta dilaksanakan di kantor cabang PT Kontak Perkasa Futures.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Agus Hermanto, dalam sambutannya mengatakan, kunjungan kerja ini ditujukan untuk memperoleh masukan dari pelaku perdagangan berjangka sehingga bisa diakomodasi pada pembahasan RUU perdagangan berjangka komoditi yang saat ini masih dalam pembahasan dengan pemerintah.

"Kami sangat berharap mendapatkan banyak masukan dari pelaku usaha, apa saja masalah mereka, sehingga nantinya dengan hasil amandemen mereka lebih nyaman melakukan perdagangan berjangka," jelas Agus.

Dalam kunjungan kerja tersebut, manajemen PT Rifan Financindo Berjangka, diberi kesempatan luas memaparkan praktik perdagangan berjangka komoditi yang telah dilaksanakan selama ini. Serta, menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Menurut Iriawan, Direksi PT Rifan Financindo Berjangka, salah satu kendala terbesar dari para pelaku pasar saat ini adalah belum terkoneksi sistem perdagangan dari bursa berjangka.

"Sampai saat ini masih ada kendala teknis yang belum tuntas sehingga koneksi jaringan perdagangan itu nyambung antara bursa dengan perusahaan pialang. Tetapi jika sistem perdagangan

itu sudah maksimal, kami juga yakin volume perdagangan berjangka akan lebih likuid dari sekarang," jelas Iriawan.

Sementara itu, Iriawan juga mengusulkan dihadapan para Anggota Komisi VI DPR RI, agar tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam amandemen RUU Perdagangan Berjangka Komoditi, diberi peran yang lebih luas pada tugas penyidikan jika terjadi ada masalah antara perusahaan pialang berjangka dengan investor.

"Selama ini, jika ada masalah antara investor dengan perusahaan pialang berjangka, dan pihak investor melaporkan ke Polisi, maka penyidik Polisi cenderung mengarahkan masalah tersebut pada praktik penipuan," ungkap Iriawan.

Pada hal, tambahnya, masalah itu belum tentu praktik penipuan. Karena bisa saja itu kesalahan ada di pihak investor atau oknum yang ada di perusahaan pialang berjangka. "Jadi, Polisi asal

menuduh. Sedangkan jika PPNS Bappebti yang turut campur dalam penyidikan sebuah masalah makan akan jelas dimana letak kesalahan tersebut. Karena PPNS Bappebti sudah memahami praktik-praktik perdagangan berjangka baik yang diatur maupun yang dilarang."

Di sisi lain, Iriawan juga menyampaikan permasalahan perpajakan pada industri perdagangan berjangka komoditi yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Dan tidak memihak pelaku usaha perdagangan berjangka.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Anggota Komisi VI DPR, agar isu pajak di bidang perdagangan berjangka ini bisa didiskusikan dengan pemerintah. Sehingga tidak memberatkan bagi pelaku usaha," kata Iriawan.

Sementara itu, dari sejumlah poin pertanyaan yang disampaikan para Anggota Komisi VI DPR RI pada manajemen PT Rifan Financindo Berjangka, diminta dijawab secara tertulis mengingat terbatasnya waktu dalam penjelasan yang lebih rinci. ▲

Anggota Komis VI DPR RI, Panita Kerja Pembahasan RUU Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Agus Hermanto, Fraksi Partai Demokrat
2. Ferrari Roemawi, Fraksi Partai Demokrat
3. Muhammad Azhari, Fraksi Partai Demokrat
4. Idris Sugeng, Fraksi Partai Demokrat
5. Linda Megawati, Fraksi Partai Demokrat
6. Ibnu Munzir, Fraksi Partai Golkar
7. Adi Putra Darmawan Tahir, Fraksi Partai Golkar
8. Eddy Kuntadi, Fraksi Partai Golkar
9. Puan Maharani, Fraksi PDI Perjuangan
10. Adisatrya Suryo, Fraksi PDI Perjuangan
11. Iskandar D. Syaichu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
12. Tossy Aryanto, Fraksi Partai Keadilan sejahtera
13. Nasril Bahar, Fraksi Partai Amanat Nasional
14. Lukman Edy, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
15. Edhy Prabowo, Fraksi Gerindra

SRG Buffer Stock Pangan Nasional

SRG merupakan salah satu sarana strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena, jumlah ketersediaan pangan yang ada ditangan masyarakat dapat dipantau dari gudang SRG.

Tim Panitia Kerja Komisi VI DPR RI yang membahas perubahan Undang-undang No. 9/2006, tentang sistem resi gudang (SRG) melakukan kunjungan kerja di DI Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 2011. Dalam kunjungan kerja yang dipusatkan di Auditorium Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu, Anggota Komisi VI DPR RI menemui sejumlah pihak. Diantaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DI Yogyakarta, Kanwil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kabupaten Bantul, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Peneliti UGM, KADIN Yogyakarta, LSM Introsulla, Gapoktan Sidomulyo, Godean, dan manajemen cabang BRI, Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut, juga dihadiri Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, dan jajaran pejabat Bappebti, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Surdiyanto Suryodarmodjo, Dirut PT Pertani (Persero), Dwi Antono, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DI Yogyakarta, Astungkoro.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, dalam pengantarnya mengatakan, SRG saat ini merupakan salah satu sarana strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena, jumlah ketersediaan pangan yang ada ditangan masyarakat dapat dipantau dari gudang SRG.

"Hingga saat ini belum ada angka pasti berapa besar ketersediaan pangan yang ada ditangan masyarakat. Pada hal, jika informasi ketersediaan pangan itu ada, pemerintah mungkin tidak perlu melakukan kebijakan impor beras. Impor beras hanya efektif dilakukan jika terjadi gagal panen di sentra produksi akibat cuaca buruk misalnya, atau penyakit tanaman," jelas Aria Bima.

Jadi, ditambahkan Aria Bima, SRG diharapkan bisa terlaksana di seluruh Indonesia. Karena selain untuk mengetahui buffer stock pangan, resi gudang sudah diakui melalui Undang-undang No.9/2006, sebagai surat berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh kredit pembiayaan.

"Undang-undang No. 9/2006, sudah sekitar lima tahun berlaku di Indonesia, tetapi hingga saat ini masih kurang dirasakan efek-

tifitasnya. Karena, masih terdapat kendala di sana-sini yang menghambat terlaksananya SRG," kata Aria Bima.

Salah satu kendala itu, yakni belum adanya dukungan dari lembaga keuangan perbankan. Setelah ditelusuri, belum adanya dukungan perbankan itu dikarenakan pihak perbankan masih ragu dengan adanya jaminan komoditi. "Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi SRG, dalam amandemen UU No.9/2006, diusulkan pembentukan Lembaga Penjaminan Dana SRG," tambah Aria Bima.

Lembaga ini nantinya akan berperan menggantikan kerugian pihak-pihak sebagai akibat kurangnya manajemen pengelolaan gudang sehingga mutu komoditi menurun. Atau, akibat lain seperti aksi pencurian dan bencana alam.

"Terkait dengan RUU SRG tersebut, Komisi VI DPR ingin menampung masukan dan usulan dari pelaku SRG di DI Yogyakarta, demi memperkaya pembahasan dan wawasan," ujar Aria Bima.

Program Sama

Sehubungan dengan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DI Yogyakarta, Astungkoro, mengatakan, saat ini ada banyak lembaga pemerintah yang memiliki program relatif sama dengan SRG.

"Sehingga, menurut hemat kami, karena sudah ada dalam bentuk undang-undang, program yang relatif sama tersebut menginduk kepada UU SRG. Dan, pengawasan atau koordinasinya diletakkan pada Bappebti, seperti yang sudah diatur pada UU No. 9/2006," ungkap Astungkoro.

Menurut Astungkoro, lembaga pemerintah yang saat ini memiliki program relatif sama dengan SRG datang dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UMKM. "Program dari berbagai kementerian itu tidak salah, karena lebih banyak yang melakukan maka akan lebih cepat terlaksananya SRG itu. Tetapi perlu ada pengaturan yang jelas. Sehingga masyarakat atau

petani tidak bingung dan punya satu pegangan," tegas Astungkoro.

Hal yang senada juga diutarakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Bantul, Asikin. Dikatakannya, program yang relatif sama dengan SRG sudah mulai disosialisasikan di Bantul. "Jadi, kami pun perlu kejelasan mengacu kepada sistem yang mana lebih menguntungkan petani dan masyarakat. Kalau saya amati UU SRG, sangat jelas undang-undang ini menjamin komoditi petani. Karena ada banyak pihak yang terlibat dan memiliki tanggungjawab. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, dengan keterlibatan banyak pihak tersebut akan membebani biaya kepada petani," kata Asikin.

Untuk itu, dikatakan Asikin lebih jauh, perlu diadakan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Sehingga petani pemilik komoditi merasa nyaman dengan biaya yang dikeluarkan atau dapat mengitung keuntungan yang besar dengan skema SRG ini.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang SRG juga dirasakan LSM Introsulla. Seperti dikatakan Sunarto, pengiat lembaga swadaya masyarakat di bidang pertanian ini, "UU SRG sangat membantu petani khususnya di saat panen raya di mana harga cenderung turun." "Sayangnya kami baru baca undang-undang ini. Tetapi ke depan kami pun akan mencoba mendukung petani untuk menggunakan SRG, dibandingkan menjual kepada tengkulak di saat harga panen sedang turun," kata Sunarto, optimis. ▲

Anggota Komis VI DPR RI, Panitia Kerja Pembahasan RUU Sistem Resi Gudang

1. Aria Bima, Fraksi PDI Perjuangan
2. Pasha Ismaya sukardi, Fraksi Partai Demokrat
3. Yusyus Kuswandana, Fraksi Partai Demokrat
4. Ida Ria, Fraksi Partai Demokrat
5. Jonny Buyung, Fraksi Partai Demokrat
6. Lili Asjudiredja, Fraksi Partai Golkar
7. Emil Abeng, Fraksi Partai Golkar
8. Gde Sumarjaya Linggih, Fraksi Partai Golkar
9. Hendrawan Supratikno, Fraksi PDI Perjuangan
10. Sukur H. Nababan, Fraksi PDI Perjuangan
11. Nanang Sulaiman, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
12. Mustafa Kamal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13. Mahfudz Abdurrahman, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14. Chandra Tirta Wijaya, Fraksi Partai Amanat Nasional
15. Ahmad Mumtaz Rais, Fraksi Partai Amanat Nasional
16. Mirati Dewaningsih, Faksi Partai Kebangkitan Bangsa

Gudang Pangan SRG Bantul Beroperasi

Gempa tektonik 5,6 skala Richter di tahun 2006 yang meluluh lantahkan Pasar Niten, di Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, kini telah berdiri megah gudang pangan dengan skema sistem resi gudang (SRG). Gudang ini dibangun dari dana stimulus fiskal Kementerian Perdagangan tahun 2009. Selama tahun 2010, dilaksanakan pembangunan gudang dan persiapan manajemen pengelola gudang serta edukasi masyarakat petani tentang sistem pembiayaan pasca panen itu.

Tanggal 1 Maret 2011, gudang pangan Bantul dengan kapasitas lebih dari 2000 ton gabah itu, pun resmi dioperasionalkan. Selebrasi peresmian gudang pangan itu seiring dengan kunjungan Tim Panitia Kerja Komisi VI DPR RI, yang mengemandemen UU No. 9/2006, tentang sistem resi gudang di Yogyakarta. Selain itu, hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Syahrul R. Sempurnajaya, Bupati Bantul, Sri Suryawidati, Dirut PT Pertani, Dwi Antono, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo, dan sejumlah pejabat Bantul serta petani dan kelompok tani Bantul.

Bupati Bantul Sri Suryawidati, dalam sambutannya antara lain mengatakan, ditahun 2011 ini kami mengalokasikan

sejumlah dana untuk membebaskan petani, kelompok tani dan Gapoktan dari biaya penyimpanan.

"Biaya penyimpanan itu ditanggung dari APBD Bantul, sehingga petani hanya menanggung bongkar muat gabah. Tetapi kalau pun petani punya tenaga bongkar tidak jadi masalah," kata Suryawidati.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan, kami sebagai wakil rakyat sangat bangga disela-sela kunjungan di Yogyakarta, dilaksanakan peresmian gudang pangan SRG. "Tentunya dari peristiwa ini menjadi masukan bagi kami yang saat ini sedang melakukan pembahasan perubahan dari UU No.9/2006, tentang SRG. Di samping itu, kami bisa melihat langsung proses dari mulai masuknya gabah hingga keluarnya resi gudang," ujar Aria Bima.

"Kebetulan saya termasuk salah satu anggota DPR periode lalu yang ikut merancang lahirnya UU No. 9/2006. Dan saat ini pun kembali melakukan pembahasan dan perubahan undang-undang tersebut, jadi baru kali ini saya melihat langsung mekanisme SRG itu. Setelah melihat mekanisme SRG ini, akan menambah semangat kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib petani," tambah Aria Bima.

Kepala Bappebti, Syahrul R Sem-

purnaya, dalam sambutannya juga mengatakan, dalam pengembangan SRG di Bantul dan juga daerah-daerah lain yang telah berdiri gudang SRG, Bappebti senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Bappebti juga mendorong terjadi kerjasama antara para pelaku usaha besar dan UMKM untuk meningkatkan kinerjanya.

"Proses yang tidak bisa dilupakan dan penting dari pelaksanaan SRG ini adalah edukasi dan sosialisasi pemanfaatan gudang SRG sebagai sumber pembiayaan alternatif," tandas Syahrul.

"Kami juga sangat mengharapkan BPD DI Yogyakarta segera mengajukan sebagai bank pembiayaan SRG, sehingga bisa menyalurkan pembiayaan dengan subsidi yang sudah ditetapkan melalui keputusan Kementerian Keuangan. Subsidi bunga SRG yang saat ini bisa dinikmati baru disalurkan di BPD Kasel, BPD Jabar, BPD Jateng BPD, Jatim dan BRI, tambah Syahrul.

Tahap awal pengoperasian gudang pangan SRG bantul itu, ada sebanyak 71,6 ton gabah milik petani Bantul. Masing-masing Gapoktan yang menyimpan komoditi gabah itu, Gapokan Kecamatan Sanden sebanyak 12 ton, petani Kec. Pandak, 8 ton, Gapoktan Kulonprogo 45 ton dan Gapoktan Kec. Pandak 16,6 ton. Dari seluruh total gabah tersebut setara dengan nilai Rp 124 juta. ▲



Kadis Indag, Bantul, Tri Saktiyana

Sekitar empat tahun lokasi ini tidak bernilai ekonomis, karena Pemda tidak memiliki dana untuk merehabilitasi pasar. Karena lokasi ini cukup strategis, banyak pemilik modal untuk menggunakan lokasi ini untuk dibangun mall atau supermarket dengan sewa yang cukup menggiurkan.

Tetapi oleh Pemda tidak diberi izin. Hingga pada akhirnya ada ide untuk menggunakan lokasi ini menjadi gudang SRG. Dengan dana stimulus fiskal pada tahun 2009, gudang ini kemudian berdiri.

Kendala yang dihadapi adalah mengubah paradigma para petani yang semula menjual gabah di sawah menjadi menitipkan gabah di gudang. Pem-

belajaran ini tentunya perlu waktu yang cukup panjang.

"Untuk itu pengelola gudang dan Pemda masih perlu waktu lagi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat akan pentingnya gudang SRG ini."

Pemda Bantul juga senantiasa memberi insentif kepada petani yang memanfaatkan fasilitas gudang ini. Seperti, selama tahun 2011 ini, pembebasan biaya penyimpanan bagi petani dan kelompok tani Bantul.

"Untuk kualitas gabah, gudang ini juga sudah disiapkan mesin pengering. Biaya pengering gabah juga relatif ringan sebesar Rp 100 per kg. Alokasi biaya itu hanya untuk mengganti membeli bahan bakar minyak dan tenaga operasional." ▲



Syahrul R Sempurnajaya

Mengurai Kinerja Bappebti

Pengantar Redaksi; Diawal masa kepemimpinannya, sebagai Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, berkilah untuk diwawancarai Buletin Kontrak Berjangka. Dengan alasan, masih terlalu dini untuk memetakan persoalan yang ada di Bappebti. Tetapi, berjalan tiga bulan, mantan Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, ini, sudah punya jurus-jurus untuk menjalankan roda Bappebti mengawasi dan membina industri perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi. Selengkapnya perbincangan Redaksi dengan Syahrul R. Sempurnajaya, sebagai berikut;

Tanya (T). Bagaimana pandangan Bapak dengan kondisi industri perdagangan berjangka Indonesia saat ini?

Jawab (J). Setelah saya ke beberapa daerah, saya lihat dan pelajari, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah edukasi. Khususnya di perdagangan ber-

jangka komoditi, saya lihat edukasinya harus terus dilakukan. Dan, edukasi itu tidak hanya kepada masyarakat sebagai investor tetapi juga perusahaan pialang berjangka. Seperti, bagaimana perusahaan pialang mendidik para marketingnya agar handal dalam memasarkan kontrak berjangka. Serta, mengikuti semua aturan yang ada dan berkompetisi yang sehat di antara perusahaan pialang berjangka. Oleh karena itu, moral hajat juga penting ditanamkan pada industri ini. Supaya tidak ada saling mematikan atau menjatuhkan citra sesama pesaing.

(T) Lalu, untuk meningkatkan likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi bagaimana menurut Bapak?

(J) Dalam jangka pendek, bursa berjangka didorong untuk menciptakan dan menawarkan kontrak berjangka komoditi dengan spesifikasi mini. Dengan demikian masyarakat berpenghasilan menengah bisa bertransaksi. Termasuk ibu-ibu rumah tangga. Strategi ini yang dilaku-

kan PT Antam dalam memasarkan fisik emas dengan merangkul Perum Pegadaian. Strategi itu berhasil, banyak ibu-ibu yang beli emas Antam di Pegadaian, lalu fisik emas tersebut digadaikan di Pegadaian. Jadi banyak keuntungannya bagi para ibu-ibu itu.

(T) Selain edukasi dan sosialisasi apa lagi menurut Bapak?

(J) Mengenalkan sejak usia dini industri ini kepada angkatan mahasiswa. Seperti yang sudah dilakukan pasar modal, mendirikan pojok bursa di kampus-kampus. Saya pun mendukung sangat mendukung jika perdagangan berjangka komoditi menjadi salah satu mata kuliah di perguruan tinggi. Selain itu, sosialisasi di televisi. Ini juga penting untuk meningkatkan trus kepada masyarakat.

(T) Saat ini sedang dilakukan pembahasan amandemen UU No.32/1997, di draf amandemen itu muncul sejumlah pasal terkait dengan perdagangan bila-

“bursa berjangka, harus punya ahli atau konsultan yang membidangi kontrak berjangka komoditi”

teral. Lalu ada kekhawatiran bursa dan pelaku pasar akan lebih tertarik bertransaksi bilateral dan meninggalkan transaksi multilateralnya.

[J] Kekhawatiran itu memang ada. Tetapi kami yakin hal itu bisa diatasi dengan mengeluarkan kebijakan baru yang menekan bursa dan pelaku pasar lainnya untuk fokus pada transaksi multilateral. Dan, bisa saja ada ketentuan bertransaksi bilateral diperketat, misalnya dengan modal bersih perusahaan dinaikan atau pajak transaksinya ditinggikan. Sedangkan transaksi multilateral diberi insentif, atau diberi kelonggaran-kelonggaran. Jadi ada banyak strategi yang bisa dilakukan agar dua jenis transaksi itu tidak timpang seperti sekarang.

[T] Saat ini juga sudah ada kebijakan Bappebti untuk mendorong pelaku pasar bertransaksi multilateral dengan memenuhi kewajiban minimal persen dari transaksi bilateral?

[J] Kuncinya memang dipenegasan peraturan. Tetapi sayangnya kebijakan itu kurang tegas sanksi yang dikenakan, hanya sanksi administrasi saja. Tetapi kelemahan utamanya adalah tidak adanya tim ahli komoditi di masing-masing perusahaan pialang berjangka. Makanya kita dorong perusahaan pialang berjangka memiliki unit komoditi. Dan sekarang sebagai besar perusahaan pialang berjangka sudah memiliki divisi komoditi multilateral. Demikian pula di bursa berjangka, harus punya ahli atau konsultan yang membidangi kontrak komoditi. Kalau tidak ada tenaga ahli komoditi dari dalam negeri, bisa saja mengundang yang dari luar negeri. Itu yang dilakukan bursa berjangka India. Sehingga India dalam waktu yang singkat bisa menjadi memajukan industri perdagangan berjangka komoditi-nya.

[T] Di bidang sistem resi gudang bagaimana Pak?

[J] Setelah saya pelajari, kebanyakan daerah hanya ingin membangun gudangnya saja. Supaya kelihatan ada kerjaan. Tetapi setelah gudangnya dibangun, gudang itu tidak ada isinya. Jadi saya pikir, kalau ada daerah yang mau jalankan gudang SRG, pemimpin daerah itu harus menandatangani komitmen yang berjanji bisa menggerakkan stakeholder yang ada di daerah itu. Jadi, tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang bekerja, melainkan juga instansi lain yang memiliki kepentingan sama dalam kesejahteraan rakyat petani. Sekarang 'kan kelihatan daerah mana yang serius dan yang tidak dalam menjalankan SRG ini. Jadi bagi daerah yang tidak serius menjalankan SRG akan kita tinjau ulang jenis bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat. Tetapi kalau pemimpin daerahnya mau berkomitmen, akan kita dukung. Jadi jangan asal-asalan supaya kelihatan ada kegiatan pembangunan di daerah itu.

[T] Tentang pasar lelang bagaimana Pak?

[J] Pasar lelang komoditi ini juga sama dengan SRG. Konsepnya sangat bagus, tetapi kembali lagi saya akan minta komitmen dari gubernurnya. Gubernur harus bisa mendukung pasar lelang komoditi, bila perlu setiap dilakukan

pasar lelang gubernur datang di lokasi pasar lelang. Karena, di daerah itu masih kental pamor gubernur. Kalau gubernur datang di satu acara seperti pasar lelang, maka para pesertanya yang terdiri dari petani dan pedagang pun semangat. Itu baru dari bentuk perhatian. 'Nah, kalau ada perhatian seperti itu akan menyusul kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan itu. Di sisi lain, dengan kedatangan di pasar lelang seperti itu lebih berarti dari pada lobi sana lobi sini yang tidak berdampak langsung kepada perekomian daerah tersebut.

[T] Pasar Lelang Komoditi Jawa Timur di tahun 2011 ini sudah melakukan revitalisasi. Daerah mana saja yang akan menyusul?

[J] Sekarang ini ada sebanyak 21 pasar lelang. Yang kelihatan potensial dilakukan revitalisasi ada sebanyak lima daerah. Masing-masing, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan. Salah satunya yang sudah melakukannya adalah Jawa Timur. Dan diharapkan tahun ini empat daerah itu bisa mengikuti jejak Jawa Timur. Tetapi lagi-lagi tergantung keinginan kuat pemimpin daerah itu. Bappebti hanya bisa mendukung mereka. Karena pada dasarnya program ini dicetuskan untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan daerah tersebut yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja petani.

[T] Pertanyaan terahir, nantinya disahkan dua undang-undang yang saat ini diamandemen sebagai payung hukum Bappebti, akan membuat tugas dan tanggungjawab Bappebti semakin berat. Apakah perlu ada biro tersendiri di bidang resi gudang?

[J] Wacana itu sudah didiskusikan dengan Kementerian Aparatur Negara. Sekarang 'bola' ada ditangan mereka. Seharusnya mereka menyetujui, karena tidak ada alasan untuk menolak. Apa lagi kita memiliki dua undang-undang yang bobot tugas dan tanggungjawabnya sama berat. Diharapkan tahun 2012 sudah ada titik terang adanya penambahan biro tersebut. ▲



Pasar Lelang & SRG

Solusi Sektor Pertanian NTB

Permasalahan utama yang dihadapi petani Nusa Tenggara Barat NTB adalah lemahnya pemasaran komoditi, sumber permodalan, dan akses pembiayaan. Selain itu, kredit pembiayaan yang difasilitasi lembaga keuangan untuk sektor pertanian hanya mampu diserap dan dimanfaatkan sekitar 42 %. Instrumen yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sektor pertanian NTB tersebut, yakni pasar lelang forward dan sistem resi gudang (SRG). Sehingga nantinya para petani dapat mengakses dan memanfaatkan PL Forward dan SRG sebagai sarana pemasaran komoditi serta memperoleh kredit pembiayaan dari perbankan melalui skema SRG.

Demikian antara lain wacana yang mencuat saat sosialisasi dan edukasi pasar lelang dan sistem resi gudang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 24 Februari 2011. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Biro Pasar Fisik dan Jasa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB.

Narasumber dalam sosialisasi dan edukasi pasar lelang dan SRG tersebut, antara lain, KaBag Pengawasan Pasar Lelang, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, manajemen perusahaan daerah NTB PT. Gerbang NTB Mas, Hissar Taqdir, dan manajemen PT iPasar, Dean Novel. Sedangkan para peserta berasal dari pelaku usaha agribisnis, petani/kelompok tani, perbankan, UIMKM, akademisi, Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTB, dan dinas-dinas terkait.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, NTB, Imam Maliki, mengungkapkan berbagai kendala dan kondisi aktual bidang agroindustri di Propinsi NTB. Serta, berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha lainnya.

"Permasalahan utama yang dihadapi petani di NTB adalah pemasaran komoditi, permodalan, dan akses pembiayaan," ungkap Imam.

Selain itu, tambahnya, penyerapan kredit pembiayaan dari perbankan untuk pertanian yang telah disiapkan hanya diserap/dimanfaatkan sebesar 42 %. "Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan pelaku usaha nantinya dapat memahami pasar lelang dan SRG. Sehingga dapat mengakses dan memanfaatkan pasar lelang dan SRG sebagai sarana pemasaran komoditi."

Sementara itu, dari ketiga narasumber dan jalannya diskusi panel, ada beberapa point yang menjadi fokus utama sektor agribisnis NTB. Yaitu, kondisi aktual di NTB dimana ketersediaan Gudang penyimpanan komoditi pertanian masih sangat terbatas. Hal itu pula mengakibatkan para petani tidak memiliki pilihan ketika musim panen selain langsung menjual hasil panen.

"Akibatnya, posisi tawar petani sangat lemah ketika musim panen tiba, saat supply melimpah harga komoditi menjadi sangat rendah," jelas Imam.

Saat ini di Propinsi NTB telah terdapat gudang-gudang milik Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTB. Namun keberadaan gudang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu kapasitas gudang juga relatif kecil sehingga tidak dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam Skema SRG.

Pemasaran komoditi menjadi permasalahan utama bagi petani di NTB, jadi ketika musim panen tiba petani mengalami kesulitan dalam memasarkan atau menjual hasil panennya.

"Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan implementasi SRG dapat segera dilaksanakan di Propinsi NTB dengan pembangunan gudang-gudang SRG. Dan, implementasi skema SRG sehingga dapat menjadi solusi bagi pemasaran komoditi bagi Petani," Dharmayugo.

Selain itu, SRG dan pasar lelang juga dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai alternatif dalam pemasaran komoditas pertaniannya, baik melewati pasar lelang forward ataupun pasar le-

lang spot. Tambah Dharmayugo.

Namun, dikatakan Dharmayugo, mutu komoditi hasil pertanian juga menjadi salah satu permasalahan yang ditemui di lapangan. Kualitas mutu komoditi pada umumnya bersifat heterogen, selain itu selama ini mutu komoditi yang dihasilkan petani seperti misalnya komoditi jagung umumnya memiliki kadar air yang cukup tinggi. Sehingga harga jual komoditi relatif menjadi rendah. Hal tersebut terkait dengan teknologi dan manajemen budidaya yang masih terbatas.

Terkait itu, Imam Maliki, mengatakan, ke depan diharapkan ada ketersediaan peralatan seperti mesin pengering (dryer) dan dengan penyuluhan atau edukasi pertanian kepada para petani mengenai manajemen budidaya dan pasca panen pertanian.

"Dari data Dinas Perindag NTB, penyerapan pemanfaatan kredit masih kecil sebesar 42 %. Hal ini terjadi karena masih kurangnya informasi mengenai program pembiayaan pertanian sampai kepada para petani atau kelompok tani. Selain itu, akses pembiayaan untuk petani juga dirasakan petani juga masih sangat sulit dan terbatas, terutama terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan kredit," papar Imam.

"Sejauh ini pun belum ada dukungan yang optimal dari pihak perbankan, khususnya bank daerah terhadap program pembiayaan untuk petani," tambahnya.

Sementara itu, menurut Dean Novel, kehadiran PT. iPasar di NTB merupakan salah satu solusi jangka pendek untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Khususnya bagi petani komoditi jagung.

"PT. iPasar sudah mencoba melakukan program dalam rangka menyerap komoditi jagung saat panen raya di NTB. Dengan cara, PT. iPasar sanggup untuk membeli komoditi jagung milik petani pada saat harga berada di bawah level harga jual dasar (HJD)," jelas Novel.

Hal ini tentu saja memperkuat posisi tawar petani, karena petani memiliki lebih banyak pilihan dalam memasarkan komoditinya, tambah Dean Novel. ▲

Pelatihan & Pembekalan Juru Lelang



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kalimantan Barat, mengadakan Pelatihan Juru Lelang dan Operator Aplikasi Pasar Lelang, pada 17-18 Pebruari 2011 di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Sekretaris Disperindag, Kalbar, Martha Sinyor, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pasar lelang bagi pemasaran komoditas daerah terutama komoditas unggulan. Untuk itu diharapkan agar peserta dapat mengikuti pelatihan dan menyerap pengetahuan yang disampaikan para instruktur.

Kegiatan pelatihan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelatihan juru lelang dan operator aplikasi pasar lelang. Bertindak sebagai instruktur juru

lelang yakni Edi Sunarto, yang merupakan pakar pasar lelang dari Provinsi Jawa Barat. Sedangkan instruktur untuk aplikasi pasar lelang adalah Rahadi yang merupakan konsultan Teknologi Informasi pasar lelang.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah sepuluh orang yang dibagi menjadi enam orang sebagai calon juru lelang dan empat sebagai calon operator aplikasi pasar lelang.

Materi yang diberikan kepada peserta juru lelang meliputi dasar-dasar pengetahuan komoditas, public speaking, mekanisme lelang, dan komunitas pasar lelang. Sedangkan untuk peserta calon operator aplikasi pasar lelang, disampaikan materi berupa pengenalan jaringan, database, dan pengoperasian aplikasi pasar lelang.

Di ujung acara pelatihan, kedua instruktur melakukan simulasi lelang dengan mempraktekkan cara kerja juru lelang dan operator aplikasi pasar lelang. Tahapan ini sebagai evaluasi seberapa jauh pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan oleh instruktur. ▲

Transaksi PLKA Capai Rp 237 miliar

Periode Januari-Maret 2011 nilai transaksi pasar lelang komoditi agro (PLKA) di bawah pembinaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mencapai Rp 237,676 miliar. Nilai transaksi sebesar itu disumbangkan PLKA Jawa Tengah dan PLKA Jawa Timur. Sedangkan daerah lainnya yang menyelenggarakan PLKA belum melaksanakan kegiatan pasar lelang.

Komoditi yang mendominasi transaksi di dua pasar lelang forward tersebut diantaranya, komoditi beras, sapi, kentang, cabai, pinang, kopi dan jagung.

Berdasarkan data Bappebti, pembinaan pasar lelang yang dilakukan selama tahun 2010 mencakup 21 penyelenggara pasar lelang di 19 propinsi. Masing-masing pasar lelang tersebut di

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Regional Management Barlingmascakeb, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Namun di tahun 2011, ini, dua pasar lelang sudah ditutup yakni pasar lelang Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Barlingmascakeb, Jawa Tengah.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, mengatakan, Bappebti sudah menutup dua pasar lelang di Kabupaten Agam, dan Barlingmascakeb.

"Penutupan keduanya untuk me-

musatkan kegiatan pasar lelang di ibukota provinsi masing-masing. Karena untuk Kabupaten Agam, sudah ada di Padang dan di Barlingmascakeb, sudah ada juga di Semarang, Jawa Tengah. Jadi, di satu provinsi cukup satu pasar lelang," jelas Sutriono Edi.

Selanjutnya, tambah Sutriono, dalam upaya pembinaan terhadap para pelaku pasar lelang, Bappebti telah melakukan program revitalisasi pasar lelang. "Dari 21 pasar lelang itu telah dipilih lima penyelenggara pasar lelang untuk direvitalisasi. Masing-masing PLKA Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan. Pada Februari 2011, lalu, PLKA Jatim telah direvitalisasi."

"Tujuan revitalisasi PLKA itu untuk membentuk pasar lelang menjadi mandiri dan profesional," imbuh Sutriono Edi. ▲



Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu bersama Bupati Kabupaten Bantaeng, HM Nurdin Abdullah, dan didampingi Kepala Bappebti Kemendag, Syahrul R Sempurnajaya, serta jajaran Eselon I dan II Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Gudang SRG yang terletak di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan. 18 Maret 2011



Tim Panja RUU PBK Komisi VI DPR RI didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, melakukan kunjungan kerja di cabang perusahaan pialang berjangka di Kota Solo, Jateng. Dalam tatap muka dengan pelaku pasar Anggota Komisi VI DPR melontarkan sejumlah pertanyaan dan menampung masukan dari pelaku perdagangan berjangka. 28 Februari 2011



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, menghadiri peresmian gudang SRG di Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Gudang SRG tersebut berlokasi di Desa Alas Sumur, Kecamatan Krasan Kabupaten Probolinggo. Hadiri acara itu Bupati Kabupaten Probolinggo, H. Hasan Aminuddin, pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti, BPD Jatim, PT. KBI (Persero), PT. Pertanian dan pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo. 5 Maret 2011



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Deddy Saleh, mewakili Pemerintah dalam Rapat Panja dengan Komisi VI DPR RI, membahas perubahan atas RUU tentang perubahan atas UU No. 9/2006 tentang SRG. Dan perubahan atas UU No.32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi. 24 Maret 2011



Tim Panja RUU SRG Komisi VI DPR RI didampingi Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya melakukan tatap muka dengan Civitas UGM, Kelompok Tani, LSM dan instansi terkait dalam rangka menampung masukan untuk memperkaya pembahasan RUU SRG. Yogyakarta 1 Maret 2011



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, Bupati Bantul, Sri Suryawidati, menyaksikan penyerahan resi gudang kepada Kelompok Tani Bantul. Penyerahan resi gudang tersebut menandai beroperasinya gudang pangan SRG di Bantul. 1 Maret 2011



Bappebti bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pertanian (IKAPERTA) Universitas Sriwijaya menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Resi Gudang di Hotel Horison Palembang, Sumsel. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Rektor dan Dekan Universitas Sriwijaya, Ketua IKAPERTA Universitas Sriwijaya, Deddy Saleh, yang juga Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Serta Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya dan Direktur Utama PT. Pertani (Persero), Dwi Antono. Acara ini dihadiri pejabat Pemda Kabupaten Sumsel, pelaku usaha, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, akademisi, dan undangan tema SRG sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Narasumber dialog tersebut Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Ketua Ikaperta, Deddy Saleh dan Kepala Cabang PT. Pertani Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Viskel M. 28 Maret 2011,

PT Quantum Futures Kembali Beroperasi

PT Quantum Futures (QF) kembali diberi izin beroperasi sebagai perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX). Kembalinya QF beroperasi atas dasar Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1250/BAPPEBTI/SA/03/2011, tertanggal 16 Maret 2011. Secara bersamaan, Bappebti juga mencabut Keputusan Kepala Bappebti Nomor 515/BAPPEBTI/SA/12/2008 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. Quantum Futures.

Pencabutan izin QF semula dilakukan Kepala Bappebti atas Surat Keputusan No.514/BAPPEBTI/SA/12/2008, tentang Pencabutan Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT. Quantum Futures. Keluarnya Surat Keputusan Kepala Bappebti No.514/BAPPEBTI/SA/12/2008, itu, karena QF diduga melakukan praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi. Dengan keluarnya

keputusan tersebut, manajemen QF melakukan langkah hukum lebih lanjut. Dan pada akhirnya, melalui persidangan yang dilakukan Mahkamah Agung, Bappebti diminta untuk mengembalikan izin QF.

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, PT Quantum Futures bersama penasihat hukumnya berhasil meyakinkan Mahkamah Agung dengan bukti yang berkekuatan hukum. "Sehingga, dengan keluarnya keputusan MA itu Bappebti dinyatakan kalah."

"Kami- Bappebti harus tunjukkan kebesaran jiwa bahwa kita yang tinggal di negara hukum dan demokrasi harus menghormati keputusan MA," papar Alfons

Jadi, tambahnya, walaupun Bappebti sebagai otoritas tertinggi di bidang perdagangan berjangka komoditi juga harus tunduk dengan aparat hukum yang lebih tinggi. "Bappebti pun harus memberi contoh yang baik yaitu patuh pada hukum."

Pencabutan Keputusan Kepala Bappebti tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang mewajibkan kepada Bappebti untuk mencabut Keputusan Kepala Bappebti No. 514/BAPPEBTI/SA/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Pencabutan Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT. Quantum Futures dan Keputusan Kepala Bappebti No. 515/BAPPEBTI/SA/12/2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. Quantum Futures.

Dengan dicabutnya Pencabutan Izin Usaha Pialang Berjangka tersebut, PT. Quantum Futures dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai Pialang Berjangka dan wajib memenuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka. ▲

Fasting News Layanan Informasi Pasar

Perkembangan perdagangan berjangka dunia terjadi dengan sangat cepat, sebab itu dibutuhkan sarana teknologi yang dapat menjawab masyarakat dalam mengakses berita-berita secara cepat dan tepat. Kemajuan teknologi dan kemudahan mendapatkan akses internet saat ini, telah mendukung kecepatan masyarakat dalam memperoleh informasi. Tak terkecuali informasi mengenai pasar uang dan komoditi.

Untuk mendukung dan memberi kemudahan bagi masyarakat atau investor, maka PT. Fasting Futures meluncurkan layanan khusus berupa "Blackberry Fasting News".

"Layanan ini tidak terbatas kepada investor saja, tapi juga

tersedia bagi masyarakat luas. Informasi yang kami sajikan pada layanan itu tidak saja untuk kebutuhan investor tetapi juga informasi umum tentang perdagangan berjangka," demikian dikatakan Dirut PT Fasting Futures, Dewarini Saptaningrum.

Bagi masyarakat pengguna Blackberry dapat mengakses layanan ini melalui pin 220AE28F, tambah Dewarini. Dan, setiap hari informasi atau berita yang disajikan akan update dan informasi tersebut akan langsung masuk kepemilik BB. Layanan informasi ini sudah kami luncurkan sejak awal Maret 2011.

"Informasi yang disajikan melalui Blackberry News antara lain, update harga ICDX untuk product

CPO dan Gold, hal ini merupakan salah satu cara PT Fasting Futures untuk mensosialisasikan Perdagangan Multilateral ke masyarakat, sehingga masyarakat maupun nasabah mendapat pengetahuan tentang kontrak dan harga komoditi," jelas Dewarini.

"Selain itu, masyarakat juga dapat mereview data dari berbagai pasar Asia dan America.

Khusus bagi nasabahnya, PT. Fasting Futures memberikan layanan lebih yaitu dapat mendownload software Meta BB Trader. Software tersebut dapat digunakan untuk memantau harga secara real time, termasuk untuk mengambil posisi atau menutup posisi kontrak," pungkas Dewarini Saptaningrum. ▲

JFX dan BKDI 'Bertarung' Kontrak Emas

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) rencananya pada 11 April 2011 akan meluncurkan dua kontrak terbaru berbasis emas dengan denominasi dolar Amerika Serikat. Di pihak lain Jakarta Futures Exchange (JFX) pada 16 Maret 2011, sudah terlebih dulu meluncurkan dua kontrak terbaru komoditi emas.

Kedua kontrak terbaru BKDI itu yakni kontrak gulir emas berdenominasi dolar AS atau dengan kode perdagangan GOLDUD dan kontrak gulir emas berdenominasi dolar AS dengan mata uang tetap atau GOLDID.

Sementara kontrak terbaru emas JFX, yakni kontrak gulir emas berdenominasi dolar

dengan kode perdagangan KGEUSD berukuran mini 10 troy ounce per lot. Dan, kontrak emas fix rate Rp 10.000 per dolar AS, dengan kader perdagangan KGRUSD.

Direktur Utama BKDI Megain Widjaja, mengatakan kedua kontrak berjangka emas berdenominasi dolar AS ini akan diluncurkan pada 11 April 2011. "GOLDUD merupakan kontrak berjangka emas berdenominasi dolar AS dengan kontrak spot dan posisi terbuka pada akhir hari perdagangan secara otomatis. Penyelesaian transaksi berupa serah tunai atau cash settlement," papar Megain.

"Ukuran 1 lot GOLDUD akan setara dengan 10 troy ounce emas dengan jam perdagangan selama 21,5 jam yakni sejak pukul 07.00 WIB - 04.30 WIB," tambah Megain.

Untuk kontrak GOLDID, lanjut Megain, kontraknya sama seperti GOLDUD, namun dengan mata uang tetap terhadap rupiah.

Selain itu, jam perdagangan BKDI terhadap kontrak emas sudah diperpanjang hingga 21,5 jam sejak 18 Februari 2011.

Menurut Megain, jam perdagangan yang baru tersebut sudah seiring dengan jam perdagangan emas internasional, karena telah meliputi seluruh perdagangan emas di pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Hal yang sama juga dilakukan manajemen JFX terhadap masa perdagangan kontrak berjangka emas. Yakni menjadi selama 24 jam. Sebelumnya, masa perdagangan kontrak emas hanya 19 jam. ▲

CIMB Futures Segera Jadi Anggota BKDI

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) menambahkan satu anggota pialangnya yakni CIMB Futures. Perusahaan pialang ini sudah digadag-gadag akan menjadi anggota pialang BKDI sejak tahun 2010. Jika tidak ada hambatan dalam perizinan, CIMB Futures akan resmi menjadi anggota BKDI pada Juni 2011 mendatang. Masuknya perusahaan pialang ini akan menambah daftar perusahaan pialang asing sebagai anggota BKDI.

"CIMB Futures sekarang masih mengurus perizinan sebagai pialang penanaman modal asing," kata Megain Widjaja, Direktur Utama BKDI.

Megain berharap, kehadiran CIMB Futures bisa memperbesar transaksi perdagangan kontrak berjangka untuk minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) dan emas di BKDI. "Mereka punya ahli CPO dan jaringannya sudah kuat di pasar internasional," yakni Megain.

Mengundang pialang asing masuk ke Indonesia, merupakan salah satu strategi BKDI untuk mengangkat kontrak berjangka komoditi primer atau perdagangan multilateral.

"Kami berharap CIMB bisa membantu BKDI mengejar target transaksi multilateral pada kontrak CPO dan emas," kata Megain.

Di awal tahun 2011, BKDI telah menargetkan volume transaksi sepanjang tahun mencapai rata-rata 5.000 lot per hari. Hingga akhir Februari, rata-rata transaksi harian BKDI baru mencapai 2.473 lot. Volume transaksi itu meningkat dari bulan sebelumnya, 2.072 lot per hari.

Menurut Megain, pihaknya saat ini sangat kesulitan untuk mengharapkan pialang lokal dalam menggenjot volume transaksi. Dari sebanyak 21 anggota pialang yang terdaftar di BKDI, hanya ada tiga yang serius bertransaksi kontrak komoditi. Yakni, Sinarmas

Futures, Millenium Penata Futures, dan Philip Futures.

"Sampai saat ini kebanyakan perusahaan pialang lokal lebih suka bertransaksi di sistem perdagangan alternatif (SPA) seperti perdagangan valuta asing dan indeks. Inilah yang mengalihkan citra bursa sebagai wadah perdagangan berjangka komoditi," jelas Megain.

"Pialang memang lebih mudah mendapat keuntungan dari transaksi SPA," kata dia.

Oleh karena itu, Megain berharap keberadaan para pialang bisa semakin diperjelas, menjadi pialang atau penyelenggara SPA. "Saat ini banyak pialang yang tidak jelas posisinya. Di satu pihak mereka sebagai anggota bursa, di sisi lain mereka lebih fokus menjual produk SPA yang berada di luar bursa," kata Megain Widjaja. ▲



Harga CPO-Fluktuatif

Harga CPO cenderung turun menyusul proyeksi membaiknya produksi dari negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain, faktor bencana alam di Jepang dan naiknya suku bunga di Eropa, turut memengaruhi sisi permintaan yang mendorong penurunan harga.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan, harga minyak kelapa sawit melemah seiring terkoreksinya harga minyak mentah dunia. "Hal itu karena prediksi membaiknya produksi dari Indonesia dan Malaysia pasca periode rendah produksi

akibat dampak La Nina."

"Selain itu, produk substitusi CPO seperti minyak kedelai mulai masuk ke pasaran sehingga menambah jumlah pasokan," kata Fadhli.

"Sisi permintaan tidak turun. Akan tetapi terjadi tambahan dari sisi penawaran yang menyebabkan harga minyak kelapa sawit tetap turun meskipun harga minyak mentah dunia kembali naik," katanya.

Di MDX harga kontrak CPO untuk pengiriman Juni 2011, turun sebesar 1,7 % menjadi 3.363 ringgit atau US\$ 1.109 per metrik ton. Demikian pula untuk pengiriman Mei 2011, CPO ditransaksikan turun menjadi 3.447

ringgit per metrik ton dari 3.473 ringgit per metrik ton.

Analisis senior Harvest International Futures, Ibrahim menambahkan faktor gempa bumi Jepang dan naiknya suku bunga di Eropa turut mempengaruhi sisi permintaan yang mendorong penurunan harga.

"Meski Jepang bukan konsumen utama, sebanyak 80 % impor Jepang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Dampak gempa dan tsunami menyebabkan permintaan berkurang. Naiknya suku bunga Eropa juga berpengaruh karena dapat mereduksi impor. Apalagi Indonesia sedang membuka pasar baru di Eropa," katanya. ▲

Emas Makin-Berkilau



Harga logam mulia emas kembali mencatatkan rekor tertinggi. Dalam sebuah perdagangan di bursa Nymex, transaksi emas untuk kontrak pengiriman April 2011 berada di 1.438,30 dolar AS per troy ounce. Sebelumnya, rekor tertinggi tahun ini terjadi di level 1.438,00 dolar AS per troy ounce.

Analisis Valbury Asia Futures, Erwin Poernomo, mengatakan, secara teknikal harga emas masih berada pada trend bullish. Meski begitu, investor harus waspada karena harga emas saat ini sudah over bought, jadi bisa saja mengalami koreksi.

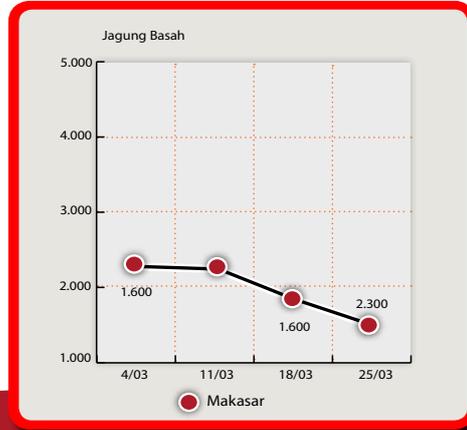
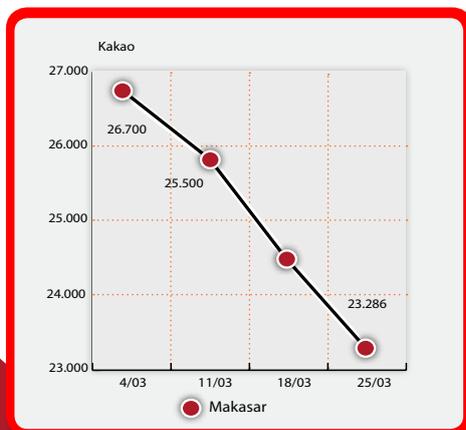
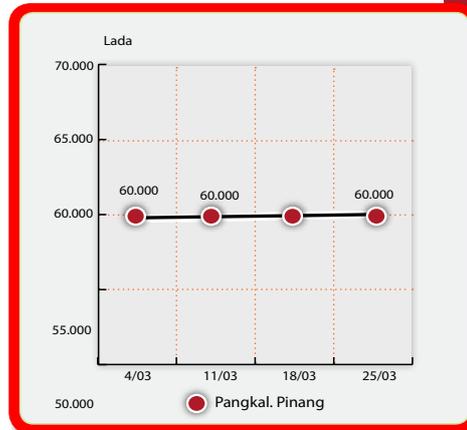
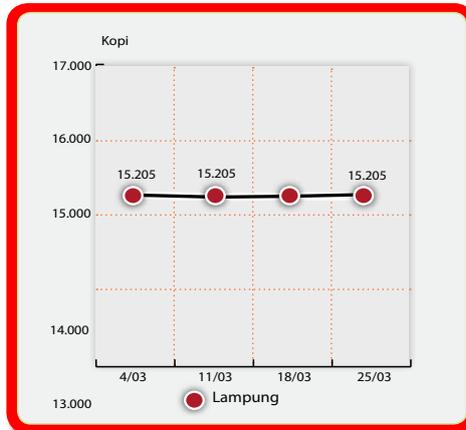
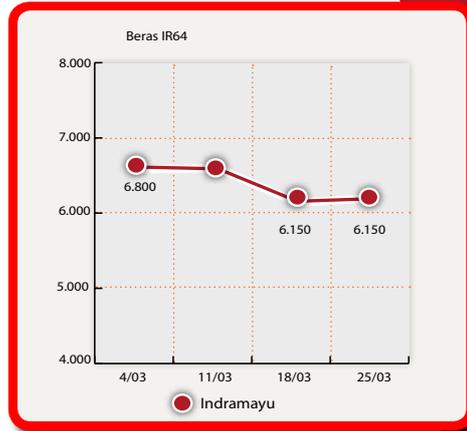
Kenaikan harga emas ini tidak

terlepas dari kondisi global yang terjadi saat ini. Harga minyak yang masih tinggi karena konflik ditambah kondisi Eropa yang masih tidak pasti memicu kecemasan pasar. Portugal gagal menaikkan suku bunga yang akhirnya membuat harga emas semakin melambung. Di tengah kondisi buruk itu, fungsi emas sebagai safe haven kembali muncul.

"Aksi beli emas sebagai lindung nilai dan serangan udara pihak Barat kepada Libya telah membantu penguatan emas," kata Erwin.

"Naiknya harga minyak juga menimbulkan kekhawatiran inflasi yang dipicu konflik Timur Tengah dan Afrika Utara," perkiraan Erwin Purnomo. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)



Java Cananga Oil

Bunga kenanga warisan tanaman budaya bangsa yang membawa harum nama Indonesia di mancanegara. Digunakan sebagai sebagai bahan kosmetik dan makanan, bunga kenanga juga ampuh basmi berbagai penyakit.

Bunga Kenanga dalam peradaban budaya bangsa Indonesia memiliki nilai tersendiri. Hal itu tampak dari berbagai acara ritual keagamaan maupun yang berhubungan ritual kedaerahan. Semua itu disebabkan karena aroma bunga kenanga yang mampu memberi kenyamanan dan kenikmatan bagi penggunaannya.

Pada etnis Jawa, bunga kenanga dikenal dengan sebutan kenongo. Dan bunga ini menjadi salah satu bagian penting dari kumpulan bunga yang sering digunakan pada berbagai ritual. Bunga kenanga kerap disandingkan dengan berbagai bunga yang mengeluarkan aroma harum, seperti bunga melati, mawar, kantil dan lainnya. Bila kumpulan bunga itu direndam dengan air yang berasal dari tujuh sumur, maka disebut dengan air bunga setaman. Air tersebut menjadi salah satu bagian ritual kesucian calon pengantin dalam acara siraman. Demikian pula pada saat upacara tingkeban yakni upacara setelah tujuh bulan mengandung.

Pada kerajaan dan keluarga bangsawan Jawa, juga tidak lepas dari aroma harum bunga kenanga bersama bunga melati dan kantil. Bunga kenanga lazim digunakan untuk bahan ngadi salira atau lebih tepat disebut perawatan tubuh para

wanita cantik bangsawan. Dalam perawatan tubuh itu, bunga atau minyak kenanga itu dijadikan sebagai bahan untuk luluran sehingga akan menghasilkan kulit dan wajah yang lembut.

Konon, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga saat ini selalu menggunakan bunga kenanga dalam memanjakan perawatan tubuhnya. Kebiasaan itu ditiru dari ibundanya Fatmawati. Menurut DR. Martha Tilaar dalam bukunya berjudul 'Kecantikan Perempuan Timur,' Megawati biasa menggunakan bunga kenanga dicampur daun pandan dan daun mangkogan, lalu direbus dengan minyak kelapa sebagai ramuan menyuburkan dan menghitamkan rambut.

Ngaris sama dengan itu, wanita Thailand pun punya kebiasaan menggunakan bunga kenanga sehabis mandi. Dalam penggunaannya, bunga kenanga diremas lalu diusap-usapkan pada tubuh sehingga terpancar aroma harum. Demikian pula pada wanita Malaysia, menggunakan bunga kenanga segar untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidur.

Di dunia laki-laki, bunga kenanga juga digunakan sebagai perpaduan tembakau untuk menghasilkan aroma sedap rokok. Kebiasaan itu

khususnya ditemukan di masyarakat Jawa Tengah.

Dalam perkembangannya, bunga kenanga tidak saja digunakan saat segar. Melainkan bunga kenanga menjadi salah satu pengikat dari berbagai bahan parfum kelas dunia. Saat ini, minyak atsiri yang dihasilkan dari bunga kenanga merupakan salah satu komoditi ekspor bernilai tinggi.

Dipasaran dalam negeri, minyak atsiri bunga kenanga berkisar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 perkilogram. Sedangkan negara tujuan ekspor minyak atsiri kenanga antara lain ke India, Singapura, China, Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, Brazil dan tentunya Amerika Serikat.

Sejak tahun 60-an, Indonesia telah dikenal dipasaran internasional sebagai negara penghasil minyak atsiri bunga kenanga. Besarnya peran Indonesia dalam mensuplai minyak kenanga maka dengan komoditi ini juga dikenal dengan Java Cananga Oil. Ekspor minyak kenanga Indonesia atau yang juga dikenal dengan Ylang-Ylang pada dunia kosmetik, mencapai 60 ton pertahun. Sedangkan daerah penghasil minyak kenanga saat ini diketahui dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Di industri makanan, minyak kenanga juga dipakai sebagai bahan flavor pada es krim, permen dan roti. Sedangkan pada industri kosmetik

digunakan sebagai bahan wewangian untuk produk sampo, sabun, losion dan cream.

Tanaman bunga kenanga bisa ditemukan dinegara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Philipina, Thailand, Malaysia dan lainnya. Tanaman ini pada umumnya tumbuh subur di hutan tadah hujan. Dan, bunga kenanga dapat tumbuh subur hingga 700 meter diatas permukaan laut.

Spesies tanaman kenanga di

Indonesia ada dua jenis yang dikenal, pertama yakni cananga latifolia. Jenis ini memiliki ciri-ciri daun berbulu halus pada permukaan bawahnya, bentuk pohon bisa tinggi atau berbentuk perdu, berbunga musiman dan daunnya berbentuk bulat telur.

Spesies kedua, cananga odorate, jenis ini umumnya memiliki daun yang tidak berbulu. Cananga odorate memiliki dua forma, yakni forma macrophylla, dan forma genuina. Kekhasan forma

macrophylla antara lain daunnya agak membundar, ukuran 20 x 20 cm. Tajuk pohon berbentuk kerucut, cabang-cabangnya berdekatan, dan pada pangkal batang terdapat lekukan-lekukan. Sedangkan forma genuina antara lain daunnya agak meruncing, ukuran 15 x 7 cm. Tajuk pohon berbentuk kerucut langsing, cabang-cabang tidak berdekatan, dan pada pangkal batang justru tampak tonjolan-tonjolan.▲

Prof. Hembeng Wijayakusuma, salah satu tokoh pengobatan herbal Indonesia, mewariskan berbagai pengobatan dengan bahan bunga kenanga. Pengobatan berbagai penyakit itu bisa dilakukan sebagai obat penyakit luar dan penyakit dalam. Berikut ini penyakit yang bisa disembuhkan dengan bunga kenanga;

Pemakaian Luar;

- Demam nifas: 5 kuntum bunga kenanga, 5 kuntum bunga turi merah, rimpang kunyit, kencur, temu hitam masing-masing 10 gram, dan 25 gram asam, semuanya ditumbuk halus, tambahkan sedikit garam dan air bersih, lalu digosokkan pada bagian punggung atau sebagai tapal pada perut. Lakukan dua kali sehari.
- Encok : 12 kuntum bunga kenanga yang belum mekar, 30 gram daun srikaya, 20 gram daun ketapang, 20 gram jahe, 10 butir merica, dicuci dan ditumbuk halus lalu tambahkan air dan kapur sirih sedikit, diaduk lalu digosokkan pada bagian badan yang sakit. Lakukan dua kali sehari.
- Kudis (scabies) : 50 gram bunga kenanga dicuci dan ditumbuk halus, tambahkan 20 cc minyak goreng, dipanaskan sebentar, setelah dingin minyaknya dioleskan pada bagian kulit yang sakit.
- Digigit serangga : 2 kuntum bunga kenanga, 1 kuntum bunga mawar, 10 kuntum bunga melati, diremas dengan 1 sendok teh minyak kelapa, kemudian ditempelkan pada luka bekas gigitan.

Pemakaian Dalam;

- Sakit kepala : 15 gram bunga kenanga dan 15 gram jahe diiris-iris, direbus dengan 400 cc hingga tersisa 200 cc, lalu airnya diminum selagi hangat.
- Mengatasi perasaan gelisah : 15 gram bunga kenanga

dan 30 gram kim cim direbus dengan 600 cc air sampai tersisa 300 cc, lalu airnya diminum sedangkan kim cimnya dapat dimakan.

- Malaria, asma : 3 kuntum bunga kenanga yang kering diseduh dengan 200 cc air mendidih lalu tutup rapat, setelah agak dingin disaring lalu diminum. Lakukan secara teratur.
- Sesak napas (asma) :
 - 15-30 gram bunga kenanga direbus dengan 200 cc air hingga tersisa 100 cc, tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir, disaring lalu diminum lakukan dua kali sehari.
 - 15 gram bunga kenanga dan 15 gram kulit semangka kering, direbus dengan 400 cc air hingga tersisa 200 cc, setelah dingin disaring lalu airnya diminum.
- Radang saluran napas (bronchitis) : 10-15 gram bunga kenanga dan 10 gram pahap/umbi bunga lili kering direbus dengan 300 cc air hingga tersisa 150 cc, disaring lalu diminum selagi hangat. Lakukan dua kali sehari.
- Batuk (tussis) : 15 gram bunga kenanga, 15 gram kulit jeruk mandarin/keprok kering, dan 10 gram pahap/umbi bunga lili kering direbus dengan 500 cc air hingga tersisa 250 cc, lalu air diminum selagi hangat. Lakukan secara teratur.
- Mencegah dan mengatasi hepatitis : 30 gram bunga kenanga, 20 gram temulawak, dan 15 gram bangle direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc. Setelah dingin, disaring lalu airnya diminum.
- Mencegah dan mengatasi bau badan : 15 gram bunga kenanga dan gula batu secukupnya direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, disaring lalu airnya diminum. Lakukan secara teratur.
- Keputihan : 30 gram bunga kenanga dan 30 gram kulit delima kering direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, setelah dingin disaring lalu airnya diminum. Lakukan secara teratur 2-3 kali sehari.
- Radang saluran kencing : 20 gram bunga kenanga, 30 gram daun kumis kucing segar, 30 gram sambiloto segar, dan 30 gram daun sendok segar, dicuci dan direbus dengan 1 liter air hingga tersisa 500 cc, lalu airnya diminum untuk dua kali sehari. Lakukan secara teratur.▲



East Java revitalized the Auction Market

The Agro Commodity Auction Market held by Industry & Trade Department of East Java Province has become the pioneer in auction market revitalization program that was found and developed by Coftra. The East Java Agro Commodity Auction Market revitalization program was formed on the 78th auction market at the Jemundo Agro business Trade centre (Puspo Argo) Sidoarjo East Java on the 22nd of February 2011.

As one of the revitalization steps of East Java Auction Market, East Java Industry & Trade Department pointed & worked together with PT Jatim Graha Utam (JGU) in running the 78th Auction Market. JGU is one of East Java Regionally Owned Enterprises (BUMD). JGU reported that the transaction point reached 80 Billion rupiahs at the auction market transaction closure.

Coftra Chairman Mr Syahrul R. Sempurnajaya in his opening speech on the auction market said that the step that was done by East Java Industry & Trade Department is an example that needs to be developed by auction market organizer all over Indonesia. "This is an embryo and will become pilot project that we will develop in Indonesia. We will ask the Ministry of Trade to socialized this to all Industry & Trade Department in Indonesia."

Syahrul R. Sempurnajaya emphasized.

He also added that the Ministry of Trade will reinforce the local government to keep restructuring various facilities that will be needed, such as internet access & IT, management and marketing and also other facilities.

"We hope that in the future, East Java can establish modern auction market model that will trade local superior commodity selectively and become the meeting point of world's seller & buyer. Other than that the auction market implementation will synergize with The Warehouse Receipt System where it will support the development of Warehouse Receipt System as restored commodity delay sale tool." Syahrul said.

Syahrul also emphasized with the successfulness of auction market revitalization program in some areas, a strong auction market organizer institution should be built by integrating with wholesale market. It will be supported by representative auction building accommodation, sufficient warehouse, guarantor institution, funding institution, quality test laboratory, transportation device, and other tools that can support the auction market development.

Syahrul also said that currently some areas other than East Java already responded government wish to revitalize the

auction market. They are the auction market in West Java, Central Java, North Sulawesi, Medan, Riau & Palembang.

The president director of JGU, Erlangga Satriagung, said that trade facility such as auction market is the key factor of trade & agricultural sector growth in the future. "The existence of Puspa Argo and commodity auction market event are the instrument that should be maximized to reinforce agricultural sector performance. Please remember one of agricultural sector success key is from the marketing and network expansion." Erlangga explained.

According to Erlangga, Puspo Argo and East Java Provincial Authority, has been trying to grow the performance of agriculture business industry in East Java. It can be seen from the effort to grow the quality and quantity of agro commodity auction market that was held by Industry & Trade Department of East Java at Puspo Argo. "This commodity auction market is very important, considering that this event is the meeting point between the business player & farmers with buyers. Here they can do direct transaction. In the meantime, the auction market is still using a building where we will use as a meeting point for farmers & buyers. In 2012 we plan to have own building for this auction with complete facilitation," Erlangga said. ▲

Friday is Indonesian Home Made Shoes Day

Indonesian Ministry of Trade announced new program to use homemade labeled shoes every Friday. This program was started with shoes exhibition on 10th – 15th of March 2011 at Ministry of Trade building.

This program is the implementation of 100% I love Indonesia (ACI) movement. ACI is not only a movement to love and use Indonesian homemade product but also a movement to raise our consciousness, pride and our appreciation to Indonesia and also to change some wrong perceptions.

Marie Elka Pangestu the Minister of Trade when announced this program said “Why we need to be proud become an Indonesian and proud about our country? Because Indonesia is rich with cultural heritage, natural beauty, great variety of culina-

ry, & the people who are friendly, tough & have high durability.

“Some of Indonesian products have same quality with comprehensive price. There are some wrong perceptions from the survey that we did where A and B type consumer have a perception that import product is better than local product. In fact lots of Indonesian product are the same with import product such as the shoes product that we see today.” Marie explained.

ACI movement is our movement. All of us can give ideas and become a catalyst to increase appreciation and pride of Indonesia. The batik and National fabric appreciation movement have been successful and the realization is the use of Batik and National fabric by the society, and at the government level national outfits are used at least twice a week.

“Today we start with Indonesian

homemade shoes appreciation. Indonesian shoes are known as qualified shoes with comprehensive price. When increasing our appreciation and pride, we will start buying and creating wider market, therefore starting this week on every Friday all Ministry of Trade’s staffs will use homemade shoes.” Marie explained further.

“The purpose of the whole week shoes exhibition is to introduce qualified shoes from Indonesia to society, and at least it starts from the Ministry of Trade’s staffs. This is done as there are more shoes from Indonesia that has high quality and also known locally and internationally. The example are Yongki Komaladi, Gino Mariani, Sledger, Andre Valentino, Andre Convert, Studio Nine, Elle Paris, Absolut, Kenny, Tomkins, Piero, and Specs,” Marie Elka Pangestu said. ▲

Indonesia expands CPO market to East Europe

The quite big increase production of crude palm oil (CPO) from year to year required Indonesia to expand the export market. Nowadays Indonesia biggest CPO export is still intended to India and China’s market. In the future, Indonesia has to expand CPO export market to other country.

The Minister of Agricultural deputy, Bayu Krishnamurti revealed that all this time Indonesian CPO export market structure still counts on China and India as priority market. “But we have to start expanding the market to East Europe. This is a promising market.” He said.

East Europe market is a very proper market for being Indone-

sian CPO export market. The reason is East Europe needs pretty much CPO for bio-fuels raw material, cooking oil and other industry raw material. “Our calculation, for temporary we can offer about 1.5 million tons – 2 million tons of CPO yearly to East Europe region.” Bayu said.

To expedite the market expansion to East Europe, Bayu said that eventually Indonesia has to develop hup or also known as collector terminal of Indonesia agriculture product in Serbia. All this time, the hup ports for Indonesia agriculture product in international region are at Amsterdam, Netherlands and Harbour, German.

According to data, Bayu added that currently Indonesian CPO product is approximately 22 million ton. From that big amount, the local CPO absorption is still low only approximately 6.5 million ton – 7 million ton. 4.5 million ton is used for cooking oil raw material, 1.5 million ton is used for non food industrial need such as oleo-chemicals and approximately 1 million ton will be converted for bio-diesel. “Therefore there is 15 million ton – 16 million ton that needs to be exported.”

According to Bayu, the marketing strategy for Indonesian CPO to East Europe market is by encouraging and facilitating Indonesian CPO businessman to invest in Europe region. “This is part of International CPO trading strategy.” ▲

Kajian Pengembangan Kontrak Berjangka CPO

***) KaBag Pengembangan Pasar, Bappebti, Widiastuti**

Pengantar redaksi: Tahun 2010, lalu, Biro Analisa Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), melakukan kajian ilmiah terhadap komoditi crude palm oil (CPO). Sebagaimana diketahui, CPO merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia dan Indonesia sebagai produsen utama dunia. Salah satu tujuan dilakukannya kajian ini yakni sebagai sumber informasi bagi Bappebti dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pengembangan kontrak berjangka CPO dan sistem resi gudang CPO di Indonesia. Point-point penting dari kajian tersebut selengkapnya dipaparkan di bawah ini.

Latar belakang

- Berdasarkan UU 32 tahun 1997 dan UU 9 tahun 2006 Bappebti memegang mandat untuk mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi tumbuhnya pasar berjangka komoditi dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang di Indonesia
- Keberadaan pasar berjangka komoditi dan Sistem Resi Gudang harus memberikan jawaban atas kebutuhan para pelaku di pasar komoditi untuk mengembangkan usahanya di dalam lingkungan dengan ketidakpastian harga komoditi
- Bappebti sebagai pembina pengembangan industri perlu merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung hal-hal di atas

Maksud dan tujuan

- Maksud : melakukan identifikasi karakteristik industri dan kriteria kesuksesan kontrak berjangka CPO serta pemanfaatan Sistem Resi Gudang CPO di Indonesia.
- Tujuan : berdasarkan hasil studi memberikan masukan bagi Bappebti dalam upaya merumuskan kebijakan pengembangan kontrak berjangka CPO dan sistem resi gudang CPO di Indonesia

Permasalahan

- Pasar berjangka di Indonesia masih belum menjadi pilihan utama para pelaku usaha komoditi CPO dalam melakukan manajemen risiko harga;
- Meskipun Indonesia adalah produsen terbesar CPO di dunia, mekanisme price discovery masih menggunakan referensi harga komoditi dari pusat-pusat perdagangan komoditi dunia, belum dari Indonesia;
- Kurangnya daya tarik Sistem Resi Gudang sebagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha CPO sebagai alternatif pembiayaan

Peta Konsumsi CPO Dunia

- Minyak nabati yang dikonsumsi terbanyak di dunia
- Produksi pada tahun 2010 diperkirakan akan mencapai ekuivalen dengan USD 37.6 milyar
- Konsumsi terbesar (2009): India (17%), China (15%) dan Indonesia (10%)
- Negara importir utama CPO : China, India, Eropa (biofuel)
- Negara produsen CPO terbesar : Indonesia (50%, sekitar 21 juta ton per tahun) dan Malaysia (38%, sekitar 17 juta ton per tahun)
- Pemanfaatan utama : minyak goreng dan semakin meningkat sebagai bahan baku biofuel
- Pergerakan harga CPO dipengaruhi oleh : pergerakan harga minyak nabati lainnya, pergerakan harga energi, dan perubahan iklim.
- Perbedaan dengan minyak nabati lainnya : paling murah dengan kualitas yang baik, diproduksi sepanjang tahun (tidak mengenal

musim), dan produktivitas lebih tinggi (dengan luas lahan yang sama)

- Peningkatan produksi akan terjadi seiring dengan penambahan lahan produksi dan peningkatan produktivitas per satuan luas
- Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang mempertanyakan mengenai status lahan dan kemampuan perkebunan kelapa sawit menjaga kualitas tanah
- CPO dapat diperlakukan sebagai komoditi yang homogen dengan karakteristik yang ditentukan oleh : kadar Free Fatty Acid (misal : maksimum 4%), tingkat moisture dan impurity (misal : maksimum 0.5%) dan nilai DOBI (Deterioration of Bleachability Index, misal: minimum 2.0).

Peta Produksi Indonesia

- CPO adalah bahan baku utama minyak goreng (sekitar 75 % pemanfaatan CPO dalam negeri adalah sebagai bahan baku minyak goreng)
- Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia
- CPO merupakan salah satu ekspor utama Indonesia
- Pada tahun 2009 industri ini menyerap sekitar 3.06 juta tenaga kerja, 2.7 juta orang di antaranya bekerja di perkebunan kelapa sawit

Sebagai produsen utama CPO dunia, penting ada instrumen manajemen risiko harga di Indonesia.

Aspek Harga CPO

- Faktor-faktor yang dapat meningkatkan posisi tawar produsen CPO di pasar:
 - Konsentrasi industri
 - Integrasi vertikal
 - Barriers to entry : besarnya biaya investasi untuk pabrik pengolahan minyak sawit dan produksi produk turunan minyak sawit, biaya perijinan, keterbatasan lahan
- Produsen CPO memiliki keleluasaan untuk memilih penjualan domestik atau ekspor (dengan pajak ekspor)
- Penelitian menunjukkan (Chalil, 2008) bahwa kelompok strategis perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar. Namun demikian sulit membuktikan adanya pengaruh kedua kelompok strategis ini terhadap harga di pasar. Yang perlu diperhatikan adalah perilaku kompetitif di antara mereka.

Referensi Harga

- Pasar minyak nabati Rotterdam
- Bursa Malaysia Derivative Berhad
- Pasar lelang KPBN
- Pasar lelang Astra Agro Lestari
- FOB di pelabuhan (misal Belawan dan Dumai)

Aspek Pengaruhi Harga CPO

- Fluktuasi harga CPO mempengaruhi :
 - Produsen tandan buah segar
 - Produsen CPO
 - Pedagang perantara / trader CPO
 - Prosesor CPO
 - Industri turunan CPO : industri-industri minyak goreng, makanan, oleochemical, margarine, sabun, deterjen, kosmetik, pakan ternak, dan biofuel
- Eksposur terhadap fluktuasi harga CPO mempengaruhi perusahaan melalui : ketidakpastian pendapatan atau ketidakpastian biaya (margin)
- Kebutuhan mitigasi risiko (mengurangi dampak negatif) terhadap fluktuasi harga tersebut bergantung pada seberapa besar pengaruh fluktuasi tersebut kepada profitabilitas pelaku pasar.

Manajemen Risiko dan Motivasi Pelaku

- Produsen CPO murni, seperti Astra Agro Lestari, dapat memilih untuk tidak melakukan lindung nilai (hedging) karena fluktuasi harga CPO tidak terlalu mempengaruhi kelayakan ekonomi dalam jangka panjang dan adanya kecenderungan naiknya harga komoditi/energi ke depan
- Motivasi produsen CPO murni untuk melakukan lindung nilai adalah keinginan untuk memiliki kepastian arus kas sesuai dengan kebutuhan / strategi perusahaan
- Industri turunan CPO yang membeli CPO perlu melakukan lindung nilai untuk mempertahankan besar penge-

luan untuk bahan baku dan mempertahankan margin. Insentif untuk melakukan lindung nilai akan lebih besar apabila perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan harga jual produk akhir kepada konsumen dan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah

- Pedagang CPO memerlukan keberadaan harga berjangka untuk memudahkan perencanaan perdagangan jangka panjang dan memperkecil biaya negosiasi

Kesimpulan

- CPO merupakan komoditi penting bagi Indonesia. Perdagangan komoditi ini menggunakan harga yang ditentukan oleh pasar.
- Interaksi antara pasokan dan permintaan, korelasi dengan harga komoditi minyak nabati lainnya, penggunaan sebagai bahan baku biodiesel, korelasi dengan harga energi, ketidakpastian iklim adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga CPO.
- Besarnya fluktuasi terutama pada waktu-waktu tertentu menimbulkan kebutuhan instrumen untuk manajemen risiko harga.
- Besarnya volume dan frekuensi perdagangan CPO memenuhi syarat perlu bagi adanya kontrak berjangka.
- Yang diperlukan selanjutnya adalah meningkatkan nilai, kualitas open interest dan volume perdagangan.
- Untuk keperluan tersebut, kebijakan terkait dengan pengembangan kontrak berjangka ini perlu mempertimbangkan beberapa hal;

a. Pertama adalah meningkatkan transparansi dan kualitas harga spot di pasar underlying.

- Dengan adanya pasar-pasar lelang fisik CPO, hal ini telah mulai terfasilitasi. Kualitas price discovery yang terjadi dapat lebih ditingkatkan dengan keberadaan pasar lelang fisik elektronik multi seller multi buyer semacam pasar fisik CPO BBJ.
- Alternatif lain adalah dengan menerapkan wajib lapor transaksi bilateral yang diberlakukan bagi anggota asosiasi. Asosiasi kemudian melakukan tabulasi, merangkum dan menyebarkan informasi harga tersebut.
- Andaikan kualitas harga ini tidak dapat tercapai, maka harga-harga di Rotterdam, BDM, maupun di Globex akan selalu menjadi referensi untuk harga di kontrak berjangka.

b. Kedua adalah kebijakan Bappebti yang dapat mendorong bursa untuk meningkatkan kualitas price discovery, jumlah open interest dan volume perdagangan kontrak berjangka CPO.

a. Spesifikasi kontrak berjangka di bursa Indonesia harus merupakan pilihan yang lebih menarik dibandingkan yang telah tersedia di BMD dan Globex.

b. Kontrak berjangka tersebut juga harus dapat bersaing dengan cara mitigasi risiko harga melalui kontrak di luar bursa.

c. Para pelaku di bursa, terutama dari posisi beli, haruslah beragam dan independen.

d. Studi determinan basis untuk meningkatkan efektivitas kontrak berjangka untuk keperluan lindung nilai.

c. Ketiga, perlu dilakukan studi mengenai motivasi para pelaku di pasar berjangka. a. Dengan mengetahui motivasi ini maka spesifikasi kontrak, cara perdagangan dan pelayanan dapat lebih dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Studi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan lindung nilai dari para produsen CPO tidak terlalu menentukan kelayakan ekonomi. Namun lindung nilai dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian arus kas di masa mendatang.

c. Prosesor CPO membutuhkan sarana lindung nilai untuk mengendalikan biaya dan/atau mempertahankan margin keuntungan. Value added yang tinggi dari produk akhir, adanya subsidi, serta tingginya rasio konsentrasi dapat mengurangi kebutuhan lindung nilai prosesor.

d. Meskipun demikian, perilaku kompetitif para pelaku prosesor dapat meningkatkan tekanan dan insentif untuk melakukan lindung nilai demi mempertahankan margin dengan mengontrol biaya.

e. Bagi para pedagang CPO, harga yang terjadi di bursa berjangka akan berguna untuk memfasilitasi dan mengurangi biaya negosiasi perdagangan jangka menengah dan panjang.

f. Selain itu, kontrak berjangka juga dapat digunakan oleh para investor atau spekulator untuk mendapatkan imbal hasil maupun melakukan cross hedging dengan kontrak serupa di bursa lain maupun kontrak komoditi substitusi.

d. Sehubungan komoditi CPO sebagai subyek SRG, studi ini menyimpulkan tidak layak.

e. Besarnya biaya penyimpanan CPO ditambah dengan beban bunga, relatif kecilnya nilai sebagai jaminan, sifat 'just in time' inventory dari perkebunan kelapa sawit, dan captive market; menyebabkan instrumen SRG tidak menarik bagi pelaku.

f. Produsen TBS pun tidak mungkin memanfaatkan SRG karena peningkatan FFA yang sangat cepat. ▲



BAGIAN PERTAMA

Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi

*) Aridono Sukmanto, mantan Kasubbid Perbankan, Mabes Polri, saat ini Waka Polda Sulteng.

Undang-Undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi merupakan bagian dari-pada hukum publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perdagangan berjangka komoditi. Tujuan diterbitkannya undang-undang ini untuk meningkatkan kegiatan usaha komoditi agar dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait yang

termasuk di dalam sistem perdagangan berjangka tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam suatu rule of the game yang terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Cuna mencapai tujuan di atas Kepolisian Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum, bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku salah satu unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perdagangan telah diberikan amanah dan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan berada di depan dalam hal penegakan hukum. Implementasi kerjasama penegakan hukum tersebut telah dituangkan di dalam suatu Nota Kesepahaman.

Dalam ketentuan Undang-Undang perdagangan berjangka, juga telah diatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi para pelaku pasar, baik dilakukan secara perorangan atau badan hukum (rechts person) di dalam transaksi berkarakter risiko tinggi pada sistem perdagangan berjangka apabila orang atau badan hukum dimaksud telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut.

Dari penjelasan di atas, timbul permasalahan apakah para pelaku pasar secara keseluruhan telah mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi mengingat saat ini banyak bermunculan baik secara perorangan maupun berupa badan hukum bertindak selaku penyedia jasa future trading menjaring nasabah atau investor untuk menjadi pelaku

pasar perdagangan berjangka melalui bursa perdagangan, serta masih adanya pemberitaan yang memberitakan mengenai belum tuntasnya penyelesaian permasalahan perdagangan berjangka yang diakibatkan tidak sungguh-sungguhnya para pelaku pidana didalam menyelesaikan kewajibannya membayar kerugian yang diderita oleh para korban sehingga diperlukan adanya struktur Direktur Kepatuhan dalam mengatasi masalah tersebut.

Jenis Tindak Pidana PBK

Dalam membahas topik di atas, Polri melihat ada beberapa jenis Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan UU No. 32/1997 dan Tindakan Pidana lain yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi. Berkaitan dengan itu, Polri juga perlu memberi pemahaman terhadap pemberlakuan hukum pidana (kriminalisasi) dalam kegiatan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Hal itu karena masih adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum pelaku pasar di dalam melakukan aktivitas transaksinya sehingga berdampak kepada suatu bentuk kerugian.

Terjadinya tindakan itu diakibatkan oleh masih terbatasnya pengetahuan tentang pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku pasar itu sendiri. Kita sadari bersama, bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan beserta ketentuan yang mengatur tentang segala aktivitas terkait perdagangan berjangka komoditi di-kandung maksud untuk menghindari pelaku pasar melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam perkembangannya, hukum pidana di Indonesia di bagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut;

a. Hukum Pidana Umum (alegemen strafrecht) atau sering disebut dengan pidana biasa atau hukum pidana sipil. Dalam penger-

tiannya, hukum pidana umum ini diperuntukkan atau ditujukan kepada masyarakat umum (commune strafrecht). Peraturan perundang-undangan yang digunakan menggunakan acuan KUHP.

b. Hukum pidana Khusus, adalah suatu peraturan yang hanya ditujukan kepada orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang tidak diatur di dalam tindak pidana umum. Pelanggaran pada hukum pidana khusus, seperti tindak pidana subversi atau tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain. Menurut Samidjo, S.H, hukum pidana khusus dapat disebut Hukum Pidana Militer,

Hukum Pidana fiskal (pajak), Hukum Pidana ekonomi dan Hukum Pidana politik.

Pada dasarnya, penegak hukum terdapat setiap perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum (rechts person,) khususnya terkait Tindak Pidana perdagangan berjangka termasuk dalam kelompok Hukum Pidana Ekonomi atau bersifat pidana khusus. Sehingga, di dalam melakukan penerapan terhadap sanksi pidana senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini disebabkan adanya azas hukum "Lex specialis derogat lex generalis" sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan pasal 103 KUHP.

Demikian halnya dalam pene-naan hukum pidana terhadap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Orang atau badan hukum baru dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi syarat unsur delik pidana, seperti

harus ada suatu perbuatan, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum yang melakukan, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan kesalahannya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, harus sudah ada suatu peraturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut, telah tersedia ancaman hukumannya.

Sanksi Pidana

Dalam ketentuan perundang-undangan No. 32/1997, telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut ditujukan terhadap segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang. Melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka yang telah berbentuk badan hukum (rechts person).

Namun demikian, pene-naan sanksi pidana sebagaimana penjelasan di atas tidak serta merta dapat dikenakan begitu saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.

Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang syah. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menetapkan ada 5 (lima) macam alat bukti yang dapat digunakan acuan penyidik dalam menduga ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan.

Kelima macam alat bukti tersebut adalah, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat

Bukti Petunjuk, Keterangan ter-sangka atau terdakwa.

Perlu dipahami pula, bahwa beberapa alat bukti di atas baru dapat memiliki nilai juridis apabila setelah berada dalam persidangan di pengadilan, jadi sebelum suatu perbuatan disidangkan di pengadilan maka pemeriksa atau penyidik hanya baru dapat menyangka atau menduga saja.

Sesuai ketentuan Pasal 61, UU No. 32/1997, sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila segala bentuk penyelesaian yang bersifat musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal inilah yang menjadi tugas utama dari saudara-saudara Direktur Kepatuhan yang ada pada masing-masing wilayah kerjanya apabila peristiwa pidana itu terjadi pada badan hukum dimana saudara bekerja untuk segera menyelesaikan sebelum diajukan ke dalam sistem peradilan pidana. (bersambung) ▲

Ammer F Rivai

Tokoh Dibelakang Layar

Dirut PT Real Time Futures (RTF), Ammer F Rivai, dalam berbagai kesempatan bila menyimak gerak-geriknya terkesan low profil. Tetapi pria berkacamata ini merupakan sosok yang banyak berperan dalam bongkar pasang perusahaan pialang berjangka. Itulah salah satu kepiawaiannya Ammer, berada diteras para pelaku perdagangan berjangka Indonesia.

Jauh sebelum RTF diambil alih kepemilikannya dari manajemen lama, Ammer, begitu dia disapa, sudah mengarsiteki perusahaan pialang ini. Bahkan ketika upaya pengambil alihan itu sudah berjalan mulus Desember 2009, dia pun belum tampak kepermukaan. "Saya lebih senang dibelakang layar," katanya singkat.

Pucuk kendali RTF kemudian berada di tangan Ammer sekitar pertengahan tahun 2010. Itu pun dikarenakan pejabat sebelumnya, mengundurkan diri dengan alasan urusan keluarga.

"Sebelum saya berada sebagai diposisi ini, adalah Ibu Anita Pondaag, yang memegang kendali. Tetapi kemudian Ibu Anita mengundurkan diri karena lebih memilih mengurus keluarga," jelas Ammer.

Menurut pengakuan pria kelahiran Pagar Alam, Palembang, Sumsel, Januari 1968, ini, setidaknya sudah ada sekitar lima perusahaan pialang yang diarsiteki di industri perdagangan berjangka Indonesia.

"Pada dasarnya semua itu hasil kerjasama tim, karena tidak mungkin semua urusan saya yang melakukannya," katanya.

"Tantangan dalam memimpin sebuah perusahaan pialang berjangka tidak sama dengan mengarsiteki

perusahaan pialang tersebut. Karena setelah kita memimpin akan berhadapan dengan berbagai latar belakang manusia. Dan mengarahkannya pada satu sasaran, target dan tujuan," papar Ammer.

Untuk itulah dalam menjalankan perusahaan ini kami memiliki strategi yang mengedepankan keunggulan pelayanan investor. Keunggulan itu sebagai upaya memudahkan investor bertransaksi. Ada sebanyak delapan keunggulan yang kami tawarkan kepada investor, atau lebih dikenal dengan The Real Time Advantage, tambah Ammer.

Salah satu keunggulan layanan RTF bagi investor adalah memberi edukasi analisa teknikal dan fundamental. "Dengan edukasi itu diharapkan para investor dapat secara langsung melakukan transaksi dari mana saja. Karena kami pun sudah siapkan teknologi yang memungkinkan transaksi secara mobil."

"Untuk pelatihan analisis, secara reguler kami mengundang para pakar dari luar negeri. Bukannya tidak ada tenaga analisis dari dalam negeri atau yang dimiliki perusahaan, tetapi dengan pakar dari luar negeri lebih meyakinkan baik bagi investor maupun manajemen," jelas ayah dari dua anak ini.

Di samping itu, tambahnya, kami juga menyediakan perangkat lunak aplikasi trading yang disuntik pada alat komunikasi berbentuk iPad. Sehingga para investor dapat melakukan transaksi dari mana saja, tanpa harus mengganggu aktivitas lain.

"Dengan The Real Time Advantage itu, kami berkeyakinan dapat memenuhi target perusahaan tanpa harus melakukan praktik yang melanggar aturan," tegas Ammer.

Karena, jangan salah, investor

saat ini juga banyak yang nakal. Mereka yang sudah paham bertransaksi melalui teknologi sering memanfaatkan kelemahan sistem perdagangan. Sehingga bisa merugikan dipihak perusahaan pialang, katanya.

"Oleh karena itu, dalam menjangking calon investor kami benar-benar selektif dan mendidiknya dengan berbagai pengetahuan perdagangan berjangka. Sehingga image industri ini pun bersih dari praktik-praktik kotor. Jadi saat ini, tidak hanya perusahaan pialang yang nakal tetapi nasabah pun banyak yang nakal, karenanya kita harus hati-hati," kata alumnus Fak. Ekonomi, Univ. Jayabaya, Jakarta, 1992, ini.

Menurut Ammer, salah satu strategi dalam menjangking calon investor yakni dengan mengerahkan Introduction Broker (IB). Tenaga IB ini bukan bagian dari RTF tetapi mereka diberi kewenangan melakukan pemasaran. Unit IB berada di bawah divisi marketing RTF.

Hingga saat ini, tenaga IB terdapat di Jogja, Bandung, Cirebon dan Pontianak. "Mereka inilah yang mengerahkan calon investor ke RTF. Kemudian setelah ditangani tim marketing, calon investor tersebut diberi pengetahuan dan dididik hingga bisa melakukan transaksi sendiri. Atau didampingi tenaga profesional yang ada di RTF."

"Dari program IB yang ada di Pontianak, kami melihatnya cukup potensial kota tersebut dijadikan salah satu cabang RTF. Keuntungannya bagi RTF dengan adanya IB, kami memiliki tenaga yang mengetahui potensi daerah," ungkap Ammer.

"Target kami tahun 2011 ini, di Kota Pontianak, akan berdiri cabang RTF. Sehingga harapan kami tahun ini sudah ada dua cabang RTF, setelah Bandung," imbuh Ammer. ▲